

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ IP)

TAHUN ANGGARAN 2025



DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KOTA BLITAR



pupr_kotablitar



Dinas PU & Penataan Ruang Kota Blitar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang tetap melimpahkan berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai selama periode akhir masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Blitar dan sekaligus Laporan ini menggambarkan pencapaian indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2025 beserta permasalahan dan langkah perbaikannya.

Tanggapan (*feed back*) serta saran-saran untuk perbaikan terhadap laporan ini sangat diharapkan guna peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini pula disampaikan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar.

Blitar, 18 Februari 2026

Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Blitar



Ir. ERNA SANTI, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 196705161998032004

EXECUTIVE SUMMARY

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 108 Tahun 2022.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar sebagai unsur pelaksana pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Di dalam menjalankan tugasnya, terdapat isu-isu strategis di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan, di antaranya peningkatan ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang dan berkelanjutan, penguatan sistem drainase dan jalan, serta penguatan pengendalian pemanfaatan ruang secara terintegrasi. Untuk menjawab isu-isu strategis tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar menyusun program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja utama dan program kegiatan selama tahun 2025, maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang menguraikan pengukuran capaian kinerja pada Tahun 2025 dari 11 (sebelas) sasaran yang sudah ditetapkan antara lain sebagai berikut :

1. Sasaran 1, yaitu Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum

Dengan indikator Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dari target **90,94 %** telah terealisasi **89,94 %** atau tercapai **98,90%**

Permasalahan :

Belum maksimalnya peran *stakeholder* dalam ikut meningkatkan infrastruktur; peran aktif dalam musrenbang belum maksimal; serta belum maksimalnya kualitas pekerjaan dari penyedia jasa

Tindaklanjut :

Meningkatkan peran *stakeholder* dalam peningkatan infrastruktur; peran masyarakat yang berperan aktif dalam musrenbang ditingkatkan; serta peningkatan kualitas pekerjaan dari penyedia jasa

2. Sasaran 2, yaitu Meningkatnya kualitas Infrastruktur Bina Marga

Dengan indikator Indeks infrastruktur Bina Marga dari target **83,26%** telah terealisasi **84,87 %** atau tercapai **101,93 %**.

Permasalahan :

Masih terdapat jalan yang rusak berat di Kota Blitar sebesar 244,316 km – 225,869 km = 18,477 km. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kendaraan ODOL (Over Dimension Over Loading) yang melintas diruas jalan yang tidak sesuai kelas dan beban layanannya. Selain itu, beberapa ruas jalan sudah mencapai umur layanan

Tindaklanjut :

Diadakan preservasi jalan berupa rehabilitasi / pemeliharaan jalan serta Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk sosialisasi dan penertiban pengguna jalan

3. Sasaran 3, yaitu Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air

Dengan indikator Indeks infrastruktur sumber daya air dari target **99,25 %** telah terealisasi **94,37 %** atau tercapai **95,08 %**.

Permasalahan :

- Sebagian konstruksi jaringan irigasi telah melewati umur bangunan sehingga rawan mengalami kerusakan
- Banyaknya endapan dan sampah disaluran irigasi dan drainase menyebabkan saluran tidak berfungsi secara optimal
- Berkurangnya lahan sawah sehingga terdapat alih fungsi daerah irigasi

Tindaklanjut :

- Menyampaikan kepada pemangku wilayah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah ke saluran dan secara berkala membersihkan saluran di lingkungannya masing-masing
- Melakukan pemeliharaan rutin terhadap jaringan irigasi yang mengalami kerusakan ringan
- Melakukan pengendalian terkait alih fungsi lahan sawah agar senantiasa mengikuti aturan yang berlaku dan tidak menurunkan kualitas jaringan irigasi di daerah dimaksud

4. **Sasaran 4, yaitu Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Cipta Karya**

Dengan indikator persentase gedung pemerintah sesuai standar dari target **97,41 %** telah terealisasi **96,97%** atau tercapai **99,55 %**.

Permasalahan :

Masih terdapat bangunan gedung yang sudah tidak memadai atau tidak sesuai dengan standar bangunan gedung antara lain ketentuan keandalan bangunan gedung yang meliputi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan untuk mendukung aktivitas kegiatan pelayanan serta didukung dengan legalitas dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Tindaklanjut :

Melaksanakan monev sebagai masukan dan laporan serta secara bertahap melaksanakan Pembangunan Rehabilitasi / pemeliharaan Gedung

5. **Sasaran 5, yaitu Meningkatnya Kompetensi Jasa Konstruksi**

Dengan indikator Persentase peran aktif jasa konstruksi dari target **80,50 %** telah terealisasi **83,33 %** atau tercapai **103,52 %**.

Permasalahan :

Masih rendahnya tingkat kompetensi bagi pelaku jasa konstruksi terutama di wilayah Kota Blitar

Tindaklanjut :

- Melaksanakan pembinaan yang aktif kepada pelaku jasa konstruksi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar
- Pemberian perhatian dalam bentuk reward dan punishment pada penyedia jasa konstruksi

6. **Sasaran 6, yaitu Meningkatnya Akses Air Minum Yang Layak Melalui SPAM**

Dengan indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses sistem Penyediaan air minum (SPAM) dari target **4,11 %** telah terealisasi **3,75%** atau tercapai **91,24 %**.

Permasalahan :

- Tata kelola aset dan pembagian kewenangan penyelenggaraan SPAM belum terdefinisi secara jelas
- Beberapa kualitas air yang diuji secara berkala masih belum memenuhi standar baku mutu

Tindaklanjut :

- Menerapkan tata kelola dan regulasi pengelolaan SPAM termasuk penyediaan lahan untuk pembangunan sesuai juknis yang berlaku
- Sosialisasi kepada masyarakat untuk memakai jaringan perpipaan yang komunal / PDAM
- Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penyediaan air minum melalui sistem jaringan perpipaan serta penanganan air limbah domestik secara terpadu menggunakan jaringan perpipaan
- Melakukan uji baku mutu air secara berkala sebagai bahan evaluasi penyediaan air bersih

7. Sasaran 7, yaitu Meningkatnya akses sanitasi layak melalui SPALD

Dengan indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dari target **11,31 %** telah terealisasi **10,90 %** atau tercapai **96,37 %**

Permasalahan :

Masih terbatasnya ketersediaan lahan dan keberlanjutan untuk pengelolaan SPALD terbangun sehingga mengakibatkan terbatasnya akses lahan untuk pembangunan jaringan perpipaan

Tindaklanjut :

- Perlu penyediaan lahan untuk pembangunan SPALD guna pengelolaan Air Limbah Domestik
- Melakukan pembinaan Kelompok Masyarakat Pengelola guna meningkatkan peran kelompok masyarakat Pengelola dalam penyiapan lahan

8. Sasaran 8, yaitu Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Pemukiman

- ❖ Dengan indikator *Persentase Rumah tangga berakses Sanitasi layak dan berkelanjutan* dari target **100 %** telah terealisasi **100 %** atau tercapai **100 %**

Permasalahan :

Secara umum tidak ada namun masih terbatasnya ketersediaan kapasitas IPLT untuk menuju sanitasi aman serta keterbatasan akses untuk penyedotan lumpur tinja dapat menjadi pertimbangan.

Tindaklanjut :

- Pendampingan pemanfaatan hotline layanan & web-app SIDOTI+, yang didukung dengan program Elektronik Transaksi Pemerintah daerah (ETPD)

- ❖ Dengan indikator *Persentase Rumah tangga berakses Air Minum layak dan berkelanjutan* dari target **100 %** telah terealisasi **100 %** atau tercapai **100 %**

Permasalahan :

Pembagian kewenangan penanganan antara SPAM Masyarakat dan PDAM yang perlu diperjelas serta keterbatasan pengetahuan atas keberlanjutan SPAM oleh masyarakat

Tindaklanjut :

Regulasi dan penataan kewenangan pengelolaan jaringan perpipaan air minum serta pembinaan teknis KP-SPAM

9. Sasaran 9, yaitu Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang

Dengan indikator Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang dari target **99.20 %** telah terealisasi **98.30 %** atau tercapai **99,09 %**

Permasalahan :

Masih terdapat kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak memperhatikan rencana tata ruang

Tindaklanjut :

Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran tentang perlunya memperhatikan rencana tata ruang melalui Aplikasi SIMTARU yang berisi tentang Informasi tata ruang yang dapat diakses secara luas sebelum melaksanakan kegiatan

10. Sasaran 10, yaitu Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang

Dengan indikator persentase penyelenggaraan penataan ruang dari target **79,25 %** telah terealisasi **78.75 %** atau tercapai **99.40 %**

Permasalahan :

Belum optimalnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.

Tindaklanjut :

- Segera melaksanakan proses penetapan revisi RDTR
- Mengoptimalkan koordinasi antar dinas terkait Untuk pelaksanaan

pengendalian tata ruang

11. Sasaran 11, yaitu Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah

Dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dari target **A (85, 95)** telah terealisasi **A (85,97)** atau tercapai **100%**

Permasalahan :

- Publikasi atas dokumen perencanaan melalui website perangkat daerah yaitu <http://dinasupr.blitarkota.go.id> belum tepat waktu
- Pengumpulan data kinerja sebagian besar masih menggunakan cara manual atau teknologi sederhana (Excel) yang mengakibatkan data rawan hilang
- Pengisian data kinerja yang telah diintegrasikan pada A-Data Pemerintah Kota Blitar belum terupdate secara maksimal
- Pelaporan kinerja telah digunakan untuk perbaikan aktifitas dan evaluasi kinerja, namun ada penyesuaian penggunaan anggaran belum tertuang dalam dokumen perencanaan
- Hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi perhatian dan kepedulian bagi seluruh pegawai
- Belum optimalnya tindaklanjut rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kerja

Tindaklanjut :

- Melakukan publikasi dokumen perencanaan secara tepat waktu agar dapat dimanfaatkan secara lebih optimal
- Memanfaatkan teknologi informasi secara lebih optimal dalam pengumpulan data kinerja sehingga diperoleh data dukung kinerja yang lebih handal
- Memanfaatkan laporan pengukuran kinerja dalam penyesuaian penggunaan anggaran dan menuangkannya dalam dokumen perencanaan
- Memberikan informasi atas hasil pelaporan kinerja organisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Dinas pekerjaan Umum dan penataan Ruang
- Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja, perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

Sedangkan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya sebagai berikut :

Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja	% Capaian Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5 = 3/4
Meningkatnya kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indekss Infrastruktur Pekerjaan Umum	98,90	93,83	1,05
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bina Marga	Indekss Infrastruktur Bina Marga	101,93	95,74	1,06
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Indekss Infrastruktur Sumber Daya Air	95,08	98,06	0,97
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Persentase Gedung Pemerintah Sesuai Standar	99,55	94,14	1,06
Meningkatnya Kompetensi Jasa Konstruksi	Persentase Peran Aktif Jasa Konstruksi	103,52	73,42	1,40
Meningkatnya Akses Air Minum yang Layak Melalui SPAM	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	91,24	47,71	1,91
Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Melalui SPALD	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	96,37	84,95	1,13
Meningkatnya ketersediaan dan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Pemukiman	Persentase Rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	100,00	47,71	2,09
	Persentase Rumah tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	100,00	84,95	1,17
Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	99,09	84,85	1,17
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	99,40	84,85	1,17
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100,00	90,28	1,11

Pencapaian kinerja utama / Sasaran Strategis dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2025 dapat dikatakan **BAIK**, walaupun masih terdapat beberapa kendala/hambatan dalam pelaksanaannya antara lain :

- ❖ Masih banyaknya kendaraan dengan beban overload yang melintas di ruas jalan yang tidak sesuai fungsi dan peruntukannya
- ❖ Sebagian konstruksi jaringan irigasi telah melewati umur bangunan sehingga rawan mengalami kerusakan
- ❖ Masih terdapat bangunan gedung yang sudah tidak memadai atau tidak sesuai dengan standar bangunan gedung antara lain ketentuan keandalan bangunan gedung yang meliputi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan untuk mendukung aktivitas kegiatan pelayanan
- ❖ Masih rendahnya tingkat kompetensi bagi pelaku jasa konstruksi
- ❖ Belum tersedianya tata kelola aset dan juga belum jelasnya pembagian kewenangan penyelenggaraan SPAM
- ❖ Keterbatasan kesediaan lahan untuk Sanitasi dan Air Minum
- ❖ Belum optimalnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
- ❖ Pengukuran kinerja yang belum maksimal dan sesuai dengan rumusan yang ditetapkan dalam perencanaan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)	ii
Daftar Isi	11
Daftar Tabel	13
BAB I PENDAHULUAN	14
A. Latar Belakang	14
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	15
C. Maksud dan tujuan	17
D. Dasar Hukum	17
E. Aspek – Aspek Strategis	19
F. Isu – Isu Strategis	20
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	21
A. Rencana Strategis 2021 – 2026	21
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	24
C. Realisasi Tindak Lanjut Atas Rekomendasi LKjIP Tahun 2024	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran	34
1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2025	35
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 – 2025	46

3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Periode Renstra	60
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM.....	64
B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)	64
1. Alokasi per Sasaran Pembangunan.....	65
2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran	66
3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	67
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM.....	72
C. Prestasi/Penghargaan.....	72
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Langkah Perbaikan	75

LAMPIRAN-LAMPIRAN		
A.	Matrik Rencana Strategis OPD Tahun 2021 – 2026	L1
B.	Rencana Kerja Tahun 2025	L2
C.	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	L3
D.	Pengukuran Kinerja Tahun 2025	L4

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama / Indikator Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar	23
Tabel 2.2	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar	24
Tabel 2.3	Program Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar	25
Tabel 2.4	Tindak Lanjut Rekomendasi LKJIP Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar	27
Tabel 3.1	Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025	35
Tabel 3.2	Perbandingan Capaian Tahun 2023 – 2025	46
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Akhir Periode Renstra 2021-2026	60
Tabel 3.4	Realisasi Kinerja SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2025	64
Tabel 3.5	Alokasi Anggaran Per Sasaran Pembangunan Tahun 2025	65
Tabel 3.6	Pencapaian Kinerja Anggaran Tahun 2025	66
Tabel 3.7	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar	67
Tabel 4.1	Rencana Tindak lanjut dan Time Line pelaksanaan Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mekanisme evaluasi dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, menempatkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat tingkat keberhasilan, atau bahkan sebuah kegagalan terhadap program yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap akhir tahun anggaran sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi selama satu tahun anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada hakikatnya merupakan kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan yang berkualitas.

Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang setiap tahun disusun pelaporannya mulai dari perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu evaluasi kinerja. Penyelenggaraan SAKIP menjadi salah satu kewajiban setiap instansi pemerintah sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2025 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah terkait kewenangan dan tugas bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Blitar. Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar diharapkan dapat menjadi :

1. Umpan balik bagi peningkatan kinerja dinas;
2. Sarana untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi;
3. Daya dorong (*supporting unit*) bagi OPD lain terkait dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

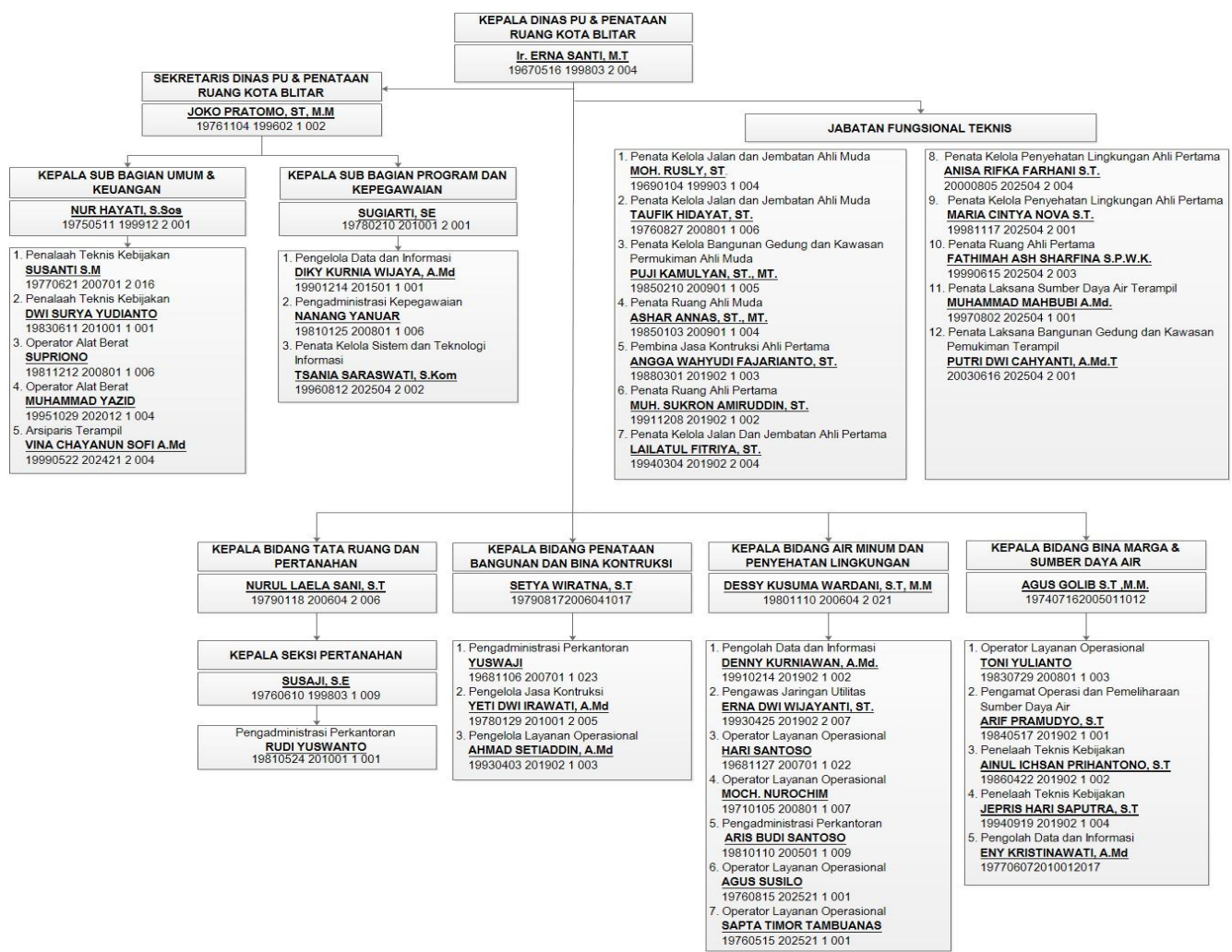
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 108 Tahun 2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Untuk menjalankan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. Pelaksanaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan;
- c. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan sumber daya air;
- d. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- e. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;
- f. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
- g. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi penataan bangunan gedung;
- h. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi penataan bangunan dan lingkungannya;
- i. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan sektor bina marga;
- j. Pengembangan jasa konstruksi;
- k. Penyelenggaraan penataan ruang;
- l. Penyelenggaraan pertanahan;
- m. Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan barang milik daerah dan kerumahtanggaan;
- n. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik, Standar Operasional Prosedur dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- o. Pengelolaan data, informasi, publikasi dan pengaduan masyarakat terkait layanan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- p. Pengelolaan data, informasi, publikasi dan pengaduan masyarakat terkait layanan bidang pertanahan;
- q. Pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli daerah;
- r. Pelaksanaan pelaporan kinerja bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

- s. Pelaksanaan pelaporan kinerja bidang pertanahan;
- t. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap seluruh pelayanan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- u. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap seluruh pelayanan di bidang pertanahan;
- v. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugas urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan.

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, 4 (empat) Bidang, 2 (dua) Sub Bagian 1 (satu) Seksi dan kelompok jabatan fungsional, sebagaimana struktur organisasi berikut :



C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar pada Tahun 2025, dengan tujuan:

1. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh pemerintah daerah maupun masyarakat;
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
3. Memberikan informasi guna penyempurnaan dokumen perencanaan serta kinerja periode yang akan datang;
4. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
5. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
6. Sebagai media dalam upaya menyempurnakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju pemerintahan yang bersih (clean government), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

D. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tahun 2025 berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi

Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 108 Tahun 2022;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Walikota Blitar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026;

- 20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- 23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 53 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

A. Aspek-Aspek Strategis

Sesuai dengan Visi Pemerintah Kota Blitar yang ingin diwujudkan pada periode tahun 2021 – 2026 yaitu : “Kota Blitar yang Maju, Sehat dan Sejahtera menuju Kota Masa Depan”,yang kemudian dituangkan ke dalam 5 (lima) misi, yaitu :

- 1. Mewujudkan Blitar Kota Pancasila yang Aman, Religius dan Nasionalis;
- 2. Mewujudkan Kota Blitar Sehat, Sejahtera dan Bahagia;
- 3. Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Smart Governance;
- 4. Mengembangkan Potensi Pendidikan, Pemuda dan Perempuan sebagai Generasi Emas yang Cerdas dan Berkarakter;
- 5. Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata, dan Industri yang Berkelanjutan.

Diantara ke 5 (lima) misi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar sesuai dengan tugas dan fungsinya mengemban misi yang ke – 3 yaitu “ **Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Smart Governance** “. Selain itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar juga menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menangani dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Sedangkan untuk Aspek-aspek strategis yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja

Utama Perangkat Daerah, meliputi:

1. Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 108 Tahun 2022 dengan tugas dan fungsi utama dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang adalah sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan;
 - b. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan sumber daya air;
 - c. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - d. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;
 - e. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
 - f. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi penataan bangunan gedung;
 - g. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi penataan bangunan dan lingkungannya;
 - h. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan sektor bina marga;
 - i. Pengembangan jasa konstruksi;
 - j. Penyelenggaraan penataan ruang;
 - k. Penyelenggaraan pertanahan;
2. Visi Kota Blitar yang membutuhkan sarana-prasarana perkotaan yang cukup besar;
Berdasarkan aspek-aspek strategis sebagaimana tersebut di atas, maka beberapa kondisi yang diharapkan di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:
 - a. Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan, jembatan, trotoar, drainase, jaringan irigasi, akses sanitasi layak, akses air minum layak, sarana dan prasarana kota serta bangunan gedung pemerintah;
 - b. Peningkatan sarana fasilitas kantor pendukung kegiatan;
 - c. Mengoptimalkan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.

B. Isu-isu Strategis

Isu strategis dapat dijadikan acuan bagi pemerintah dalam menentukan langkah-langkah penyelesaian pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, sehingga pembangunan yang dilaksanakan tepat sasaran. Isu strategis yang berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar :

1. Penerapan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum yang meliputi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan penyediaan sanitasi layak
2. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang dan berkelanjutan

3. Penguatan sistem jaringan irigasi, saluran drainase, jalan dan bangunan, pelengkap jalan di Kota Blitar
4. Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang secara terintegrasi .

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2021-2026

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan Perangkat daerah pada Khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Oleh karena itu, Renstra Perangkat Daerah sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Keterkaitan tersebut akan sangat ditentukan oleh hasil dari menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih, serta tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam Renstra PD sesuai tupoksi Perangkat Daerah.

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2025 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor, antara lain kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan ke depan, sehingga tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dapat mendukung perwujudan Visi dan Misi Kota Blitar. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2025.

Erat kaitannya dengan pencapaian Visi Kota Blitar, yaitu Terwujudnya “Kota Blitar yang Maju, Sehat dan Sejahtera menuju Kota Masa Depan”, yang mengerucut pada Misi Kota Blitar ketiga yaitu Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Smart Governance, maka dokumen perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada, serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada Misi Keempat yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama / Indikator Sasaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

RPJMD KOTA BLITAR						
VISI : Kota Blitar yang Maju, Sehat dan Sejahtera menuju Kota Masa Depan			MISI 3 : Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Smart Governance			
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR
Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum	Indekss infrastruktur pekerjaan umum	Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum	Indekss infrastruktur pekerjaan umum	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bina Marga	Indekss infrastruktur bina marga
					Meningkatnya Kualitas	Indekss infrastruktur sumber daya air
					Infrastruktur Sumber Daya Air	
					Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Persentase gedung pemerintah sesuai standar
					Meningkatnya Kompetensi Jasa Konstruksi	Persentase peran aktif jasa konstruksi
Meningkatnya kelayakhuan	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas prasarana,sarana dan utilitas di kawasan permukiman	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas prasarana,sarana dan utilitas di kawasan permukiman	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Melalui SPALD	Persentase rumah tangga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD)
		Persentase rumah tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan		Persentase rumah tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	Meningkatnya Akses Air Minum yang Layak Melalui SPAM	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Rencana Kinerja Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2021-2026. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dalam pencapaian sasaran dan tujuan selama Tahun 2025 yang didukung dengan program dan kegiatan. Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 dan keselarasannya dengan pencapaian RENSTRA 2021-2026 diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar
Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indekss Infrastruktur Pekerjaan Umum	90,94 (Indekss)
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bina Marga	Indekss Infrastruktur Bina Marga	83,26 (Indekss)
3	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Indekss Infrastruktur Sumber Daya Air	99,25 (Indekss)
4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Persentase Gedung Pemerintah Sesuai Standar	97,41 (%)
5	Meningkatnya Kompetensi Jasa Konstruksi	Persentase Peran Aktif Jasa Konstruksi	80,50 (%)
6	Meningkatnya Akses Air Minum yang Layak Melalui SPAM	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	4,11 (%)
7	Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Melalui SPALD	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	11,31 (%)
8	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana dan Utilitas di kawasan pemukiman	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	100 (%)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Persentase rumah tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	100 (%)
9	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	99,20 (%)
10	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	99,40 (%)
11	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,95) (nilai)

Untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Unit Organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dijabarkan dalam 11 (sebelas) program sebagai berikut :

Tabel 2.3
Program Tahun 2025
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penyelenggaraan Jalan	9.493.921.532,00
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	7.820.076.567,00
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	4.807.271.449,52
4	Program Penataan Bangunan Gedung	9.388.632.271,45
5	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	612.177.100,00
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	265.365.000,00
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.074.295.180,00
8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.041.228.000,00
9	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	16.4000.000,00
10	Program Penatagunaan Tanah	268.580.000,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN
11	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.071.671.871,00
JUMLAH		42.620.681.766,00

C. Realisasi Tindak Lanjut Atas Rekomendasi LKjIP Tahun 2024

Berdasarkan rekomendasi LKjIP tahun 2024 terdapat beberapa faktor hambatan yang ditemukan di antaranya adalah :

- Masih banyaknya kendaraan dengan beban overload yang melintas di ruas jalan yang tidak sesuai fungsi dan peruntukannya
- Sebagian konstruksi jaringan irigasi telah melewati umur bangunan sehingga rawan mengalami kerusakan
- Masih terdapat bangunan gedung yang sudah tidak memadai atau tidak sesuai dengan standar bangunan gedung antara lain ketentuan keandalan bangunan gedung yang meliputi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan untuk mendukung aktivitas kegiatan pelayanan
- Masih rendahnya tingkat kompetensi bagi pelaku jasa konstruksi
- Belum tersedianya tata kelola aset dan juga belum jelasnya pembagian kewenangan penyelenggaraan SPAM
- Keterbatasan kesediaan lahan untuk Sanitasi dan Air Minum
- Belum optimalnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
- Pengukuran kinerja yang belum maksimal dan sesuai dengan rumusan yang ditetapkan dalam perencanaan

Dalam menghadapi permasalahan di atas, terdapat beberapa langkah perbaikan yang perlu dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu :

- Optimalisasi rehabilitasi / pemeliharaan jalan
- Peningkatan pemeliharaan rutin jaringan irigasi
- Peningkatan ketersediaan dan kualitas bangunan gedung dan fasilitas umum
- Peningkatan pelaksanaan pembinaan kepada pelaku jasa konstruksi
- Optimalisasi pengelolaan air limbah domestik
- Peningkatan akses air minum
- Optimalisasi fungsi pengendalian penataan ruang
- Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja, perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

Tabel 2.4
Tindak Lanjutt Rekomendasi LKJIP Tahun 2024
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi / Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Progress		Keterangan	
				Sudah	Belum	Tindak Lanjut	Bukti Dukung
1	Optimalisasi rehabilitasi / pemeliharaan jalan	Pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin jalan, pemeliharaan rutin jembatan, rehabilitasi jembatan dan rehabilitasi jalan	Program : Penyelenggaraan Jalan Kegiatan : Penyelenggaraan jalan Kabupaten / Kota Sub Kegiatan : ❖ Pemeliharaan berkala jalan ❖ Pemeliharaan rutin jembatan ❖ Rehabilitasi jembatan ❖ Rehabilitasi jalan ❖ Pemeliharaan Rutin Jalan	√		Optimalisasi rehabilitasi / pemeliharaan jalan skala rutin dan penanganan aduan masyarakat terkait infrastruktur jal	Pemeliharaan Berkala di Jalan & Jembatan Sekrapyak (2025)  Survey rencana pemeliharaan berkala jalan bersama Kementerian PUPR (2025) 

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi / Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Progress		Keterangan	
				Sudah	Belum	Tindak Lanjut	Bukti Dukung
2	Peningkatan pemeliharaan rutin jaringan irigasi	Pembangunan, peningkatan serta operasi dn pemeliharaan jaringan irigasi permukaan	Program : Pengelolaan Sumber Daya Air Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem irigasi Primer dan Sekunder pada daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 daerah Kabupaten / Kota Sub Kegiatan : ❖ Pembangunan Jaringan Irigasi permukaan ❖ Peningkatan jaringan irigasi permukaan ❖ Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan	√		Optimalisasi rehabilitasi / pemeliharaan jalan skala rutin dan penanganan aduan masyarakat terkait infrastruktur jalan	Pemeliharaan Talud di area IPAL Ramsa (2025)  Pemeliharaan & konservasi mata air Sumber Judelan (2026) 
3	Peningkatan ketersediaan dan kualitas bangunan gedung dan fasilitas umum	Monev pemeliharaan bangunan gedung dan fasilitas umum	Program : Penataan Bangunan Gedung Kegiatan : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin	√		Monev pemeliharaan bangunan gedung dan fasilitas umum	Monitoring & evaluasi gedung kelurahan plosokerep (2025) 

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi / Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Progress		Keterangan	
				Sudah	Belum	Tindak Lanjut	Bukti Dukung
			Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Sub Kegiatan : ❖ Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				Monitoring & evaluasi fasum drainase (2026) 
4	Peningkatan pelaksanaan pembinaan kepada pelaku jasa konstruksi	Melaksanakan pembinaan kepada pelaku jasa konstruksi	Prgram : Pengembangan Jasa Konstruksi Kegiatan : Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Sub Kegiatan : ❖ Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi ❖ Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	√		Melaksanakan pembinaan kepada pelaku jasa konstruksi	Forum perangkat daerah bersama pelaku jasa konstruksi (2026)  Fasilitasi sertifikasi jasa konstruksi (2025) 

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi / Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Progress		Keterangan	
				Sudah	Belum	Tindak Lanjut	Bukti Dukung
5	Optimalisasi pengelolaan air limbah domestik	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja , Pembangunan SPALD Terpusat, penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja , serta pembinaan dan pemberdayaan dalam pengembangan SPALD	Program : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : ❖ Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) ❖ Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman ❖ Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja ❖ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat ❖ Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan	√		Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja , Pembangunan SPALD Terpusat, penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja , serta pembinaan dan pemberdayaan dalam pengembangan SPALD	Fasilitasi sedot kakus masyarakat (2025-2026)  Pembangunan MCK Individu (2025) 

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi / Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Progress		Keterangan	
				Sudah	Belum	Tindak Lanjut	Bukti Dukung
			Air Limbah Domestik (SPALD)				
6	Peningkatan Akses air minum	Sosialisasi kepada masyarakat untuk pemakaian jaringan perpipaan yang komunal / PDAM	Program : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	√		Sosialisasi kepada masyarakat untuk pemakaian jaringan perpipaan yang komunal /	Sosialisasi penambahan Sambungan Rumah (2025)  Sosialisasi pelaporan capaian kegiatan (2026) 
7	Optimalisasi fungsi pengendalian penataan ruang	Penetapan kebijakan dalam rangka penataan ruang	Program : Penyelenggaraan penataan Ruang Kegiatan : ❖ Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	√		Penetapan substansi perda RTRW Kota Blitar dalam rangka penataan ruang	Rapat koordinasi terkait Substansi RTRW (2025-2026) 

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi / Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Progress		Keterangan	
				Sudah	Belum	Tindak Lanjut	Bukti Dukung
			❖ Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota ❖ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : ❖ Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang ❖ Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota ❖ Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota ❖ Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang ❖ Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi / Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Progress		Keterangan	
				Sudah	Belum	Tindak Lanjut	Bukti Dukung
			❖ Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang ❖ Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang ❖ Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				
8	Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja, perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi	Monev akuntabilitas dalam upaya efektifitas dan efisiensi kinerja Perangkat daerah	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : ❖ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	√		Kegiatan forum koordinasi publik terkait SKM	Rapat koordinasi terkait Substansi RTRW (2025-2026) 

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara :

- Membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.
- Membandingkan realisasi kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga/Rencana Strategis SKPD.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Rumus 1

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

Persentase tingkat capaian

=

Realisasi

Rencana

x 100 %

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria, yaitu :

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Prosentase	
1.	85 % s.d 100 %	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2.	70 % s.d < 85 %	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55 % s.d < 70 %	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil

4.	< 55 %	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil
----	--------	---------------------------------	----------------

1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2025

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar telah melaksanakan kinerja berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) / Indikator Sasaran Strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2025 diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tabel Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Blitar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indekss Infrastruktur Pekerjaan Umum	90,94	89,94	98,90
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bina Marga	Indekss Infrastruktur Bina Marga	83,26	84,87	101,93
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Indekss Infrastruktur Sumber Daya Air	99,25	94,37	95,08
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Persentase Gedung Pemerintah Sesuai Standar	97,41	96,97	99,55
Meningkatnya Kompetensi Jasa Konstruksi	Persentase Peran Aktif Jasa Konstruksi	80,50	83,33	103,52
Meningkatnya Akses Air Minum yang Layak Melalui SPAM	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	4,11	3,75	91,24
Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Melalui SPALD	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	11,31	10,90	96,37

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana dan Utilitas di Kawasan Pemukiman	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	100	100	100
	Persentase rumah tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	100	100	100
Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	99,20	98,30	99,09
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	79,25	78,75	99,40
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A 85,95	A 85,95	100
Rata-rata				107,34

Pada tabel tersebut di atas adalah capaian kinerja pada sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar yang dijabarkan di bawah ini :

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum

- ❖ Indikator Indekss Infrastruktur Pekerjaan Umum , dengan rumus perhitungan 50% Indekss Infrastruktur Bina Marga + 40% Indekss Infrastruktur SDA + 10% Indekss Infrastruktur Cipta Karya , pada tahun 2025 terealisasi **90,94 %** dari target **89,94%** sehingga tercapai **98,90%**.

URAIAN	DATA TAHUN 2025	PENGHITUNGAN
❖ Indekss Infrastruktur Bina Marga	84,87	50% (84,87) + 40% (94,37) + 10% (97.49) = 89,94
❖ Indekss Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)	94,37	

❖ Indeks Infrastruktur Cipta karya (% gedung sesuai standar + % Drainase dalam keadaan baik + % RT berakses Sanitasi layak dan berkelanjutan + % RT berakses Air Minum Layak dan Berkelanjutan : 4)	(96,97 + 92,97 + 100 + 100) : 4 = 97,49	
--	---	--

- ❖ Faktor yang mendukung dari keberhasilan ini adalah peran *stakeholder* dalam peningkatan infrastruktur; peran masyarakat yang berperan aktif dalam musrenbang; serta peningkatan kualitas pekerjaan dari penyedia jasa, sehingga mendapatkan atribut **Sangat Berhasil**;
- ❖ Permasalahan :
 - Kurangnya data pendukung jumlah kebutuhan bangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum
 - Skala prioritas penanganan infrastruktur belum sepenuhnya sinkron dengan update database kondisi infratsruktur
- ❖ Tindaklanjut :
 - Penambahan alokasi anggaran untuk pendataan bangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum
 - Menyinkronkan dan berkoordinasi terkait rencana kegiatan berdasarkan updating database kondisi infrastruktur

2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bina Marga.

- ❖ Indikator kinerja Indeks infrastruktur Bina Marga, dengan rumus perhitungan Rata-rata penjumlahan persentase jalan dan bangunan pelengkap (trotoar dan saluran) dalam kondisi baik dan jembatan dalam kondisi baik pada tahun 2025 terealisasi terealisasi **84,87** dari target **83,26** sehingga tercapai **101,93%**.

URAIAN	DATA TAHUN 2025	PENGHITUNGAN
❖ Jalan dalam kondisi baik	(225.896 km : 244.316 km) x 100 = 92,50	(92,50 + 64,24 + 97,86) : 3 = 84,87
❖ Trotoar (bangunan pelengkap jalan) dalam kondisi baik	(45,015 km : 70,134 km) x 100 = 64,24	
❖ Jembatan dalam kondisi baik	(137 unit : 140 unit) x 100 = 97.86	

- ❖ Faktor pendorong tercapainya target salah satunya adalah Koordinasi yang masif dengan instansi terkait dalam upaya mempercepat capaian kinerja serta Sinergitas antar stake holder. Dapat disimpulkan bahwa untuk sasaran meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bina Marga memperoleh atribut **Sangat Berhasil**;
- ❖ Permasalahan :
Masih terdapat jalan yang rusak berat di Kota Blitar sebesar 244,316 km – 225,869 km = 18,477 km. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kendaraan ODOL (Over Dimension Over Loading) yang melintas diruas jalan yang tidak sesuai fungsi dan peruntukannya.
- ❖ Tindak Lanjut :
Diadakan rehab / pemeliharaan jalan serta Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk sosialisasi dan penertiban pengguna jalan

3. Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air

- ❖ Indikator Kinerja Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air dengan rumus perhitungan Rata-rata penjumlahan persentase saluran irigasi dan persentase Sumber air dalam kondisi baik, pada tahun 2025 terealisasi **94,37%** dari target **99,25%** sehingga tercapai **95,08%**.

URAIAN	DATA TAHUN 2025	PENGHITUNGAN
❖ Jumlah saluran irigasi dalam kondisi baik	(249.793,83 km : 252.317 km) x 100 = 99,00	(99,00 + 89,74) : 2 = 94,37
❖ Sumber air dalam kondisi baik	(70 unit : 78 unit) x 100 = 89,74	

- ❖ Faktor pendorong tercapainya target adalah Adanya Monitoring dan Evaluasi yang terjadwal serta updating terhadap kondisi jaringan irigas. Dapat disimpulkan bahwa untuk sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur sumber daya air memperoleh atribut **Sangat Berhasil**;
- ❖ Permasalahan :
 - Sebagian konstruksi jaringan irigasi telah melewati umur bangunan sehingga rawan mengalami kerusakan
 - Banyaknya endapan dan sampah disaluran irigasi dan drainase menyebabkan saluran tidak berfungsi secara optimal

- ❖ Tindaklanjut :
 - Menyampaikan kepada pemangku wilayah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah ke saluran dan secara berkala membersihkan saluran di lingkungannya masing-masing
 - Melakukan pemeliharaan rutin terhadap jaringan irigasi yang mengalami kerusakan ringan

4. Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Cipta Karya

- ❖ Indikator kinerja persentase gedung pemerintah sesuai standar dengan rumus perhitungan jumlah bangunan gedung pemerintah yang sesuai standar dibagi jumlah total bangunan gedung pemerintah x 100%, pada tahun 2025 telah terealisasi **96,97 %** dari target **97,41 %** sehingga tercapai **99,55 %**.

URAIAN	DATA TAHUN 2025	PENGHITUNGAN
❖ Jumlah bangunan gedung yang sesuai standar	94 unit	94 unit : 97 unit x 100 = 96,91
❖ Jumlah bangunan gedung pemerintah	97 unit	

- ❖ Faktor yang menjadi pendorong atas keberhasilan ini adalah penanganan pemenuhan standar bangunan yang teralokasikan di beberapa perangkat daerah selaku pengguna/pengelola. Dapat disimpulkan bahwa untuk sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur cipta karya mendapatkan atribut **Sangat Berhasil**;
- ❖ Permasalahan :

Masih terdapat bangunan gedung yang sudah tidak memadai atau tidak sesuai dengan standar bangunan gedung antara lain ketentuan keandalan bangunan gedung yang meliputi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan untuk mendukung aktivitas kegiatan pelayanan
- ❖ Tindaklanjut :

Melaksanakan monev sebagai masukan dan laporan serta secara bertahap melaksanakan Pembangunan Rehabilitasi / pemeliharaan Gedung

5. Sasaran Meningkatnya Kompetensi Jasa Konstruksi,

- ❖ Indikator kinerja persentase peran aktif jasa konstruksi dengan rumus perhitungan

jumlah jasa konstruksi yang aktif dibagi jumlah total jasa konstruksi Kota Blitar x 100%, pada tahun 2025 terealisasi **83,33 %** dari target **80,50 %** sehingga tercapai **103,52 %**.

URAIAN	DATA TAHUN 2025	PENGHITUNGAN
❖ Jumlah Jasa konstruksi yang aktif	72 Badan Usaha	(72 BU : 90 BU) x 100 = 80
❖ Jumlah total jasa konstruksi di Kota Blitar	90 Badan Usaha	

- ❖ Faktor yang menjadi pendorong tingkat keberhasilan ini dapat tercapai dengan dukungan adanya Tertib perijinan dan tertib administrasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi serta terlaksanakanya pekerjaan konstruksi yang tepat waktu, tepat mutu dan tepat biaya. Dapat disimpulkan bahwa untuk sasaran meningkatnya kompetensi jasa konstruksi mendapatkan atribut **Sangat Berhasil**;
- ❖ Permasalahan :
Masih rendahnya tingkat kompetensi bagi pelaku jasa konstruksi
- ❖ Tindaklanjut :
 - Melaksanakan pembinaan yang aktif kepada pelaku jasa konstruksi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar
 - Pemberian perhatian dalam bentuk reward dan punishment

6. Sasaran Meningkatnya Akses Air Minum yang Layak Melalui SPAM,

- ❖ indikator persentase Rumah Tangga yang memiliki akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dengan rumus perhitungan jumlah rumah tangga yang memiliki akses SPAM dibagi jumlah rumah tangga x 100%, pada tahun 2025 terealisasi **3,75 %** dari target **4,11 %** dengan tingkat capaian **91,24 %**.

URAIAN	DATA TAHUN 2025	PENGHITUNGAN
❖ Jumlah rumah tangga yang memiliki Akses SPAM	7.635 RT	Capaian nilai kumulatif sampai dengan tahun 2024 : 3,61 Capaian nilai kumulatif tahun 2025 : 7.635/52.691 = 0,14 Jadi perhitungannya : 3,61 + 0,14 = 3,75
❖ Jumlah rumah tangga	52.691 RT	

- ❖ Faktor yang menjadi pendorong tingkat keberhasilan ini dapat tercapai dikarenakan semakin besarnya komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk

pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal melalui penyediaan akses air minum bagi masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa untuk sasaran meningkatnya akses air minum yang layak melalui SPAM mendapatkan atribut **Sangat Berhasil**;

- ❖ Permasalahan :
 - Belum tersedianya tata kelola aset dan juga belum jelasnya pembagian kewenangan penyelenggaraan SPAM
 - Masih terdapat kualitas air yang belum memenuhi standar baku mutu
- ❖ Tindaklanjut :
 - Merumuskan dan menetapkan tata kelola dan regulasi pengelolaan SPAM termasuk penyediaan lahan untuk pembangunan
 - Sosialisasi kepada masyarakat untuk memakai jaringan perpipaan yang komunal / PDAM
 - Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penyediaan air minum melalui sistem jaringan perpipaan serta penanganan air limbah domestik secara terpadu menggunakan jaringan perpipaan

7. Sasaran meningkatnya akses sanitasi layak melalui SPALD,

- ❖ Indikator persentase Rumah Tangga yang memiliki akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), dengan rumus perhitungan jumlah rumah tangga yang memiliki akses SPALD dibagi jumlah rumah tangga x 100%, pada tahun 2025 terealisasi **10,90 %** dari target **11,31 %** dengan capaian **96,37 %**.

URAIAN	DATA TAHUN 2025	PENGHITUNGAN
❖ Jumlah rumah tangga yang memiliki Akses SPAM	4.732 RT	Capaian nilai kumulatif sampai dengan tahun 2024 : 10,81 Capaian nilai kumulatif tahun 2025 :
❖ Jumlah rumah tangga	52.691 RT	4.732/52.691 = 0,09 Jadi perhitungannya : 10,81 + 0,09 = 10,90

- ❖ Faktor yang menjadi Pendorong tingkat keberhasilan ini dikarenakan Sanitasi merupakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat yang menjadi prioritas Nasional . Meskipun demikian, jika dilihat dari angka target dengan angka realisasi, capaian kinerja tersebut dapat disimpulkan **Sangat Berhasil**; Penguatan peran masyarakat dalam peran penyediaan dan penyelenggaran santasi

- ❖ **Permasalahan :**
 Masih keterbatasan ketersediaan lahan dan keberlanjutan untuk pengelolaan SPALD terbangun
- ❖ **Tindaklanjut :**
 - Perlu penyediaan lahan untuk pembangunan SPALD guna pengelolaan Air Limbah Domestik
 - Melakukan pembinaan Kelompok Masyarakat Pengelola guna meningkatkan peran kelompok masyarakat Pengelola

8. Sasaran Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Pemukiman

❖ *Indikator Persentase Rumah tangga berakses sanitasi layak dan Berkelanjutan ,*

URAIAN	DATA TAHUN 2025	PENGHITUNGAN
❖ Jumlah rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	52.489 Rumah Tangga	(52.489 RT : 52.691 RT) x 100 = 99,616
❖ Jumlah rumah tangga	52.691 Rumah Tangga	

dengan rumus perhitungan Jumlah rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan dibagi total jumlah rumah tangga x 100% , pada tahun 2024 terealisasi **99,616 %** dari target **99,26 %** sehingga tercapai **100,36 %**.

- Faktor yang mendukung dari keberhasilan ini adalah dikarenakan Sanitasi merupakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat yang menjadi prioritas Nasional yang didukung oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/M/2017 tentang penyelenggaraan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestikdan PMDN Nomor 59 tahun 2021 tentang SPM , sehingga mendapatkan atribut **Sangat Berhasil;**
- **Permasalahan :**
 Masih terbatasnya ketersediaan kapasitas IPLT untuk menuju sanitasi aman serta keterbatasan akses untuk penyedotan lumpur tinja
- **Tindaklanjut :**
 - Penyusunan Dokumen Kajian Perluasan IPLT
 - Penyusunan Kajian layanan IPLT yang tepat guna misalnya Updating dan pendampingan Aplikasi SIDOTI+, Layanan IPLT dengan menggunakan

Program elektronik transaksi Pemerintah daerah (ETPD)

- Pengembangan Sistem Informasi SIAMALD (Sistem Informasi Jaringan Air Limbah Domestik berbasis GIS (Geografic Informations System / Sistem Informasi Geografis)

❖ Indikator Persentase Rumah tangga berakses Air Minum Layak dan Berkelanjutan

URAIAN	DATA TAHUN 2025	PENGHITUNGAN
❖ Jumlah rumah tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	52.691 Rumah Tangga	(52.691 RT : 52.691 RT) x 100 = 100
❖ Jumlah rumah tangga	52.691 Rumah Tangga	

dengan rumus perhitungan Jumlah rumah tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan dibagi total jumlah rumah tangga x 100% , pada tahun 2024 terealisasi **100 %** dari target **98.76 %** sehingga tercapai **101.26 %**.

- Faktor yang mendukung dari keberhasilan ini adalah dikarenakan semakin besarnya komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal melalui penyediaan akses air minum bagi masyarakat yang didukung oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/M/2017 tentang penyelenggaraan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestikdan PMDN Nomor 59 tahun 2021 tentang SPM , sehingga mendapatkan atribut **Sangat Berhasil**;
- **Permasalahan :**
Pembagian kewenangan penanganan antara SPAM Masyarakat dan PDAM perlu diperjelas serta adanya keterbatasan pengetahuan atas keberlanjutan SPAM oleh masyarakat
- **Tindaklanjut :**
Regulasi penataan kewenangan pengelolaan jaringan perpipaan air minum serta Pembinaan teknis KPSPAM

9. Sasaran Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang

- ❖ Indikator Persentase Kesesuaian pemanfaatan tata ruang , dengan rumus perhitungan Luas lahan yang sesuai tata ruang dibagi total luas lahan , pada tahun 2025 terealisasi **98,30 %** dari target **99,20 %** sehingga tercapai **99,09 %**.

URAIAN	DATA TAHUN 2025	PENGHITUNGAN
--------	-----------------	--------------

❖ Luas lahan yang sesuai tata ruang	3262,598	(3262,598 : 3319,018) x 100 = 98,3
❖ Total Luas lahan	3319,018	

- ❖ Faktor yang mendukung dari keberhasilan ini adalah penerapan teknologi Aplikasi pendukung pencapaian kinerja , kerjasama Tim yang solid serta adanya koordinasi yang baik , sehingga mendapatkan atribut Sangat Berhasil;
- ❖ Permasalahan :
Masih terdapat kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak memperhatikan rencana tata ruang
- ❖ Tindaklanjut :
Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran tentang perlunya memperhatikan rencana tata ruang melalui Aplikasi SIMTARU yang berisi tentang Informasi tata ruang yang dapat diakses secara luas sebelum melaksanakan kegiatan

10. Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang,

- ❖ Indikator persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan rumus perhitungan rata-rata penjumlahan persentase perencanaan penataan ruang + persentase pengendalian pemanfaatan ruang, pada tahun 2025 terealisasi **78.75 %** dari target **52.88 %** sehingga tercapai **148.92 %**.

URAIAN	NILAI	PREDIKAT KINERJA
❖ Persentase Pengaturan Penataan Ruang	82.50	Baik
❖ Persentase Pembinaan penataan ruang	89.81	Baik
❖ Persentase perencanaan tata ruang	75.00	Sedang
❖ Persentase pemanfaatan ruang	71.43	Sedang
❖ Persentase pengendalian pemanfaatan ruang	75.00	Sedang
Nilai Kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang dan pelaksanaan Penataan Ruang	78.75	Sedang

- ❖ Faktor yang mendukung dari keberhasilan ini adalah peningkatan peran forum penataan ruang Kota Blitar dalam mendukung penyelenggaraan penataan ruang serta penerapan teknologi aplikasi pendukung pencapaian kinerja , kerjasama tim

dan koordinasi yang baik , sehingga mendapatkan atribut **Sangat Berhasil**;

❖ Permasalahan :

Belum optimalnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang

❖ Tindaklanjut :

- Segera melaksanakan proses penetapan revisi RTRW dan RDTR
- Menoptimalkan koordinasi antar dinas terkait
- Meningkatkan pelaksanaan pengendalian tata ruang

11. Nilai SAKIP Perangkat Daerah,

❖ Dengan rumus perhitungan nilai SAKIP Perangkat Daerah, pada tahun 2025 memperoleh nilai **A (85,97)** dari target nilai **A (85,95)** atau tercapai **100%**.

❖ Faktor yang mendukung dari keberhasilan ini adalah semakin meningkatnya kinerja perangkat daerah melalui peningkatan tertib administrasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan, sehingga mendapatkan atribut **Sangat Berhasil**.

❖ Permasalahan :

- Publikasi atas dokumen perencanaan melalui website perangkat daerah yaitu <http://dinasupr.blitarkota.go.id> belum tepat waktu
- Pengumpulan data kinerja sebagian besar masih menggunakan cara manual atau teknologi sederhana (Excel) yang mengakibatkan data rawan hilang
- Pelaporan kinerja telah digunakan untuk perbaikan aktifitas dan evaluasi kinerja, namun ada penyesuaian penggunaan anggaran belum tertuang dalam dokumen perencanaan
- Hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi perhatian dan kepedulian bagi seluruh pegawai
- Belum optimalnya tindaklanjut rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kerja

❖ Tindaklanjut :

1. Melakukan publikasi dokumen perencanaan secara tepat waktu agar agar dapat dimanfaatkan secara lebih optimal

2. Memanfaatkan teknologi informasi secara lebih optimal dalam pengumpulan data kinerja sehingga diperoleh data dukung kinerja yang lebih handal
3. Memanfaatkan laporan pengukuran kinerja dalam penyesuaian penggunaan anggaran dan menuangkannya dalam dokumen perencanaan
4. Memberikan informasi atas hasil pelaporan kinerja organisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Dinas pekerjaan Umum dan penataan Ruang
5. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja, perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

Dari uraian capaian kinerja tersebut di atas, rata-rata tingkat keberhasilan dari 11 (sebelas) sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2025 adalah sebesar **107,34 %** atau mendapatkan atribut **Sangat Berhasil**

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 – 2025

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 - 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 - 2025
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Blitar

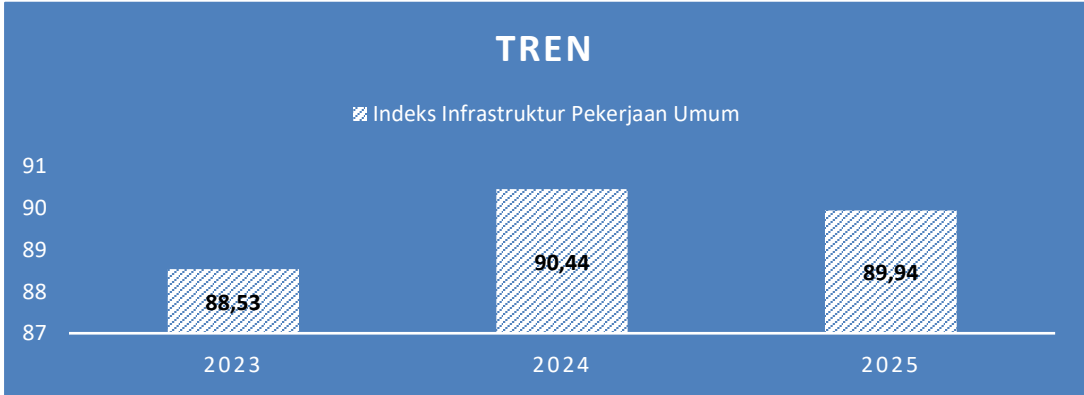
SASARAN	INDIKATOR	TARGET			REALISASI		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indekss Infrastruktur Pekerjaan Umum	86.77	88.42	90,94	88.53	90.44	89,94
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bina Marga	Indekss Infrastruktur Bina Marga	76,40	79.10	83,26	79,05	82.76	84,87
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Indekss Infrastruktur Sumber Daya Air	97,75	98.50	99,25	98,42	98.61	94,37
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Persentase Gedung Pemerintah Sesuai Standar	94,70	94.85	97,41	94,80	96.91	96,67
Meningkatnya Kompetensi Jasa Konstruksi	Persentase Peran Aktif Jasa Konstruksi	47,83	57.75	80,50	57,70	80.00	83,33

SASARAN	INDIKATOR	TARGET			REALISASI		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
Meningkatnya Akses Air Minum yang Layak Melalui SPAM	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2,70	3,18	4,11	3,13	3.61	3,75
Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Melalui SPALD	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	9,45	9.82	11,31	9,36	10,81	10,90
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana dan Utilitas di Kawasan Pemukiman	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	97.00	99.26	100	99.22	99.62	100
	Persentase rumah tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	98.38	98.76	100	98.70	100	100
Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	95.40	95.45	99,20	95.73	98.70	98,30
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	44,63	52.88	79,25	52,83	78.75	78,75
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A 85,50	A 85,50	A 85,95	A 85,48	A 85,90	A 85,97

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijabarkan bahwa untuk :

1. Capaian kinerja Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum

Indikator	Target			Realisasi		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Indekss Infrastruktur Pekerjaan Umum	86,77	88,42	90,94	88,53	90,44	89,94



Indekss Infrastruktur Pekerjaan Umum pada tahun 2023 mencapai angka 88,53 melebihi dari target 86,77. Pada tahun 2024 mencapai angka 90,44 mengalami kenaikan sebesar 3,67 poin jika dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2025 dengan target **90,94** terealisasi **89,94** dan mengalami penurunan sebesar 0,50 poin jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang terealisasi **90,44 %**.

Adapun faktor pendukung keberhasilan Indekss Infrastruktur Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

- ❖ Adanya peningkatan peran *stakeholder* dalam infrastruktur
- ❖ Partisipasi masyarakat yang berperan aktif dalam musrenbang
- ❖ Adanya peningkatan kualitas pekerjaan dari penyedia jasa

Sedangkan faktor penghambatnya antara lain :

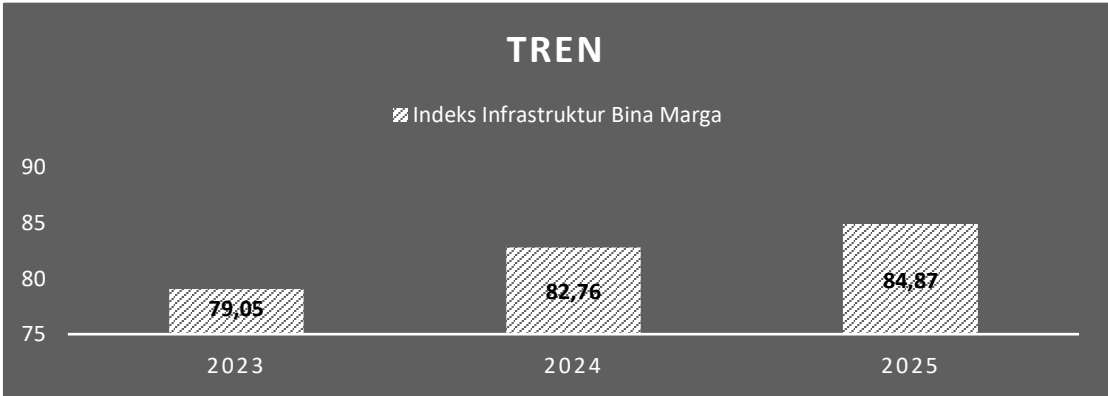
- ❖ Kurangnya data pendukung jumlah kebutuhan bangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum
- ❖ Skala prioritas penanganan infrastruktur belum sepenuhnya sinkron dengan update database kondisi infratsruktur

Sebingga tindak lanjut yang harus dilakukan untuk meningkatkan capaian Indekss Infrastruktur Pekerjaan Umum adalah :

- ❖ Adanya ketersediaan alokasi anggaran untuk pendataan bangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum
- ❖ Menyinkronkan dan berkoordinasi terkait rencana kegiatan berdasarkan updating database kondisi infrastruktur

2. Capaian kinerja Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bina Marga

Indikator	Target			Realisasi		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Indekss Infrastruktur Bina Marga	76,40	79.10	83,26	79,05	82.76	84,87



Indekss Infrastruktur Bina Marga pada tahun 2023 mencapai angka 79,05. Pada Tahun 2024 Indekss Infrastruktur Bina Marga mencapai 82,76 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 3,71 poin jika dibandingkan dengan tahun 2023.

Sedangkan pada tahun 2025 realisasi capaian sebesar 84,87 atau naik 2,11 yang melebihi realiasasi dari tahun 2024 yaitu sebesar 82,76.

Hal ini dikarenakan adanya Faktor pendukung yaitu :

- ❖ Adanya dukungan dan koordinasi yang masif dengan instansi terkait dalam upaya mempercepat capaian kinerja serta sinergitas antar stake holder

Sedangkan faktor penghambat Capaian Indekss Infrastruktur Bina Marga adalah :

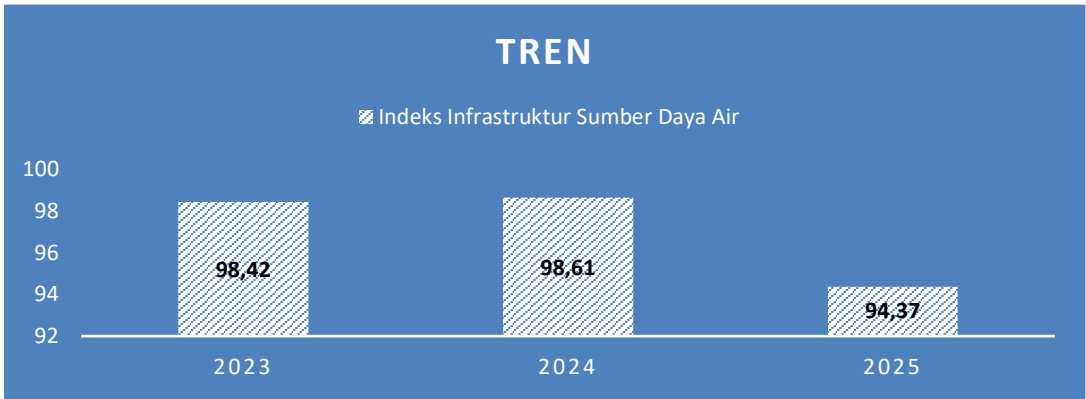
- ❖ Masih terdapat jalan yang rusak berat di Kota Blitar sebesar 2,96 km. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kendaraan dengan beban overload yang melintas diruas jalan yang tidak sesuai fungsi dan peruntukannya

Sehingga tindaklanjut untuk meningkatkan capaian Indekss Infrastruktur Bina Marga adalah sebagai berikut :

- ❖ Diadakan rehab / pemeliharaan jalan serta Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk sosialisasi dan penertiban pengguna jalan

3. Capaian kinerja Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air

Indikator	Target			Realisasi		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Indekss Infrastruktur Sumber Daya Air	97,75	98.50	99,25	98,42	98.61	94,37



Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air pada tahun 2023 mencapai angka 98,42. Pada tahun 2024 Indekss Infrastruktur Sumber Daya Air mencapai 98,61 mengalami kenaikan sebesar 0,19 poin jika dibandingkan dengan tahun 2023. Sedangkan pada tahun 2025 realisasi capaian mengalami penurunan sebesar 94,37 atau turun sebesar 4,24 dibandingkan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 98,61

Sedangkan faktor penghambat Capaian Indekss Infrastruktur Sumber Daya Air adalah :

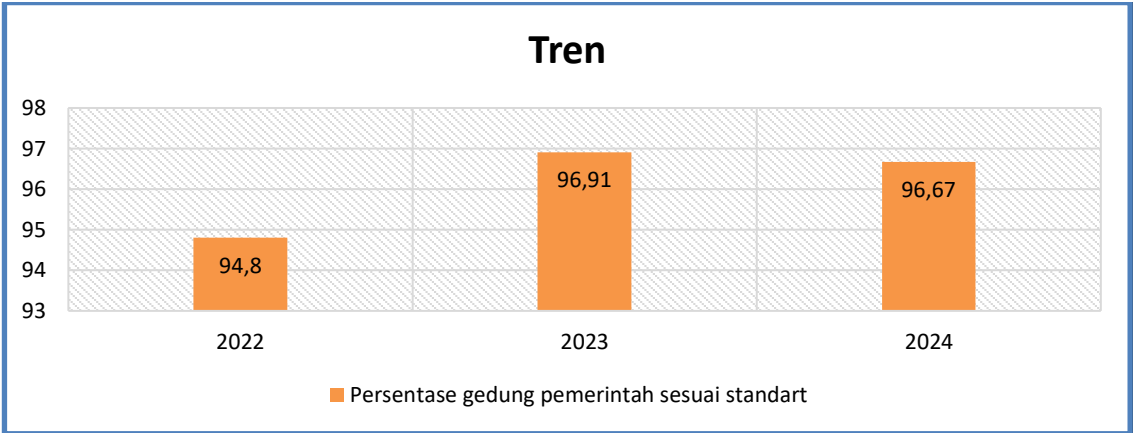
- ❖ Sebagian konstruksi jaringan irigasi telah melewati umur bangunan yang menyebabkan rawan kerusakan
- ❖ Banyaknya endapan dan sampah disaluran irigasi dan drainase menyebabkan saluran tidak berfungsi secara optimal

Sehingga tindaklanjut untuk meningkatkan Capaian Indekss Infrastruktur Sumber Daya Air adalah sebagai berikut :

- ❖ Menyampaikan kepada pemangku wilayah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah ke saluran dan secara berkala membersihkan saluran di lingkungannya masing-masing
- ❖ Melakukan pemeliharaan rutin terhadap jaringan irigasi yang mengalami kerusakan ringan

4. Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Cipta Karya

Indikator	Target			Realisasi		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Persentase Gedung Pemerintah Sesuai Standar	94,70	94,85	97,41	94,80	96,91	96,67



Persentase Gedung Pemerintah sesuai Standar pada tahun 2023 mencapai angka 94,80 % . Pada Tahun 2024 mencapai 96,91 % yang mengalami kenaikan sebesar 2,11 % jika dibandingkan tahun 2023. Sedangkan pada tahun **2025** dengan target **97,41 %** terealisasi **96,67 %** dan mengalami penurunan sebesar 0,25 % jika dibandingkan dengan tahun **2024** yang terealisasi **96,91 %**.

Hal ini disebabkan karena adanya faktor pendukung, antara lain :

- ❖ Tersedianya cukup besar dukungan pemenuhan standar bangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum yang dikelola oleh beberapa perangkat daerah pengguna/pengelola;

Sedangkan faktor penghambat Capaian Persentase gedung Pemerintah sesuai standar adalah :

- ❖ Masih terdapat bangunan gedung yang sudah tidak memadai atau tidak sesuai dengan standar bangunan gedung antara lain ketentuan keandalan bangunan gedung yang meliputi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan untuk mendukung aktivitas kegiatan pelayanan

Sehingga tindak lanjut yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

- ❖ Melaksanakan monev sebagai masukan dan laporan serta secara bertahap melaksanakan pembangunan rehabilitasi / pemeliharaan gedung

5. Capaian kinerja Meningkatnya Kompetensi Jasa Konstruksi

Indikator	Target			Realisasi		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Persentase Peran Aktif Jasa Konstruksi	47,83	57,75	80,50	57,70	80,00	83,33



Persentase Peran Aktif Jasa konstruksi pada tahun 2023 realisasi mencapai 57,70%. Pada tahun 2024 telah teralisasi 80,00% yang mengalami kenaikan drastis dalam pencapaian realisasi sebesar 22,30 % jika dibandingkan dengan tahun 2023. Pada tahun 2025 dari target **80,50 %** terealisasi **83,33 %** dan mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 2,83% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar **80,50 %**.

Hal ini dikarenakan adanya faktor pendukung, antara lain :

- ❖ Terselenggaranya peningkatan pelatihan sertifikasi tenaga jasa konstruksi secara rutin, tertib perijinan dan tertib administrasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang tepat waktu, tepat mutu dan tepat biaya;

Sedangkan faktor penghambat dari indikator Persentase peran aktif Jasa konstruksi antara lain :

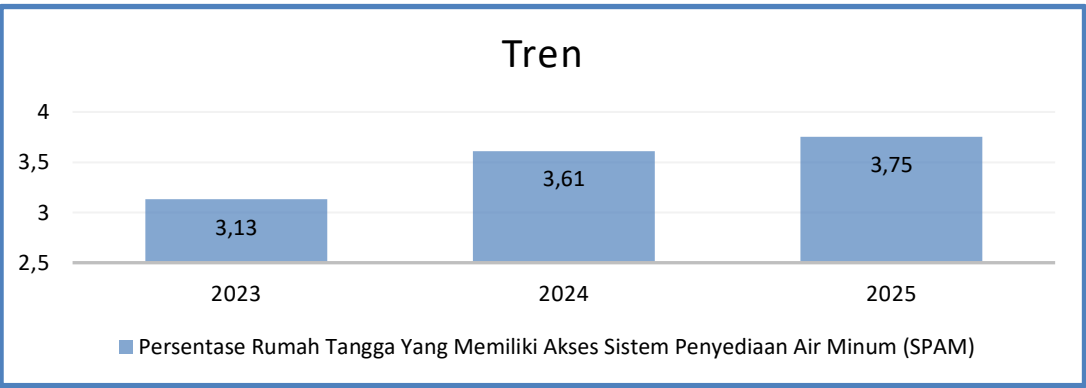
- ❖ **Masih rendahnya tingkat kompetensi bagi pelaku jasa konstruksi**

Sehingga tindak lanjut yang harus dilakukan untuk meningkatkan capaian realisasi sebagai berikut :

- ❖ Melaksanakan pembinaan yang aktif kepada pelaku jasa konstruksi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar
- ❖ Pemberian perhatian dalam bentuk reward dan punishment

6. Capaian kinerja pada sasaran Meningkatkan Akses Air Minum yang Layak Melalui SPAM

Indikator	Target			Realisasi		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2,70	3,18	4,11	3,13	3.61	3,75



Indikator Persentase Rumah tangga yang memiliki Akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada tahun 2023 mencapai realisasi sebesar 3,13 % . Pada tahun 2024 tercapai 3,61 % yang mengalami kenaikan sebesar 0,48% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023. Pada tahun 2025 dari target **4,11 %** mencapai realisasi sebesar **3,75 %** namun mengalami kenaikan **0,14%** jika dibandingkan tahun 2024 yang teralisasi **3,61 %**.

Hal ini dikarenakan adanya faktor pendukung, yaitu :

- ❖ Semakin besarnya komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk pelaksanaan SPM melalui penyediaan akses air minum bagi masyarakat

Sedangkan Faktor penghambat, antara lain :

- ❖ Belum tersedianya tata kelola aset dan belum jelasnya pembagian kewenangan penyelenggaraan SPAM
- ❖ Masih terdapat kualitas air yang belum memenuhi standar baku mutu

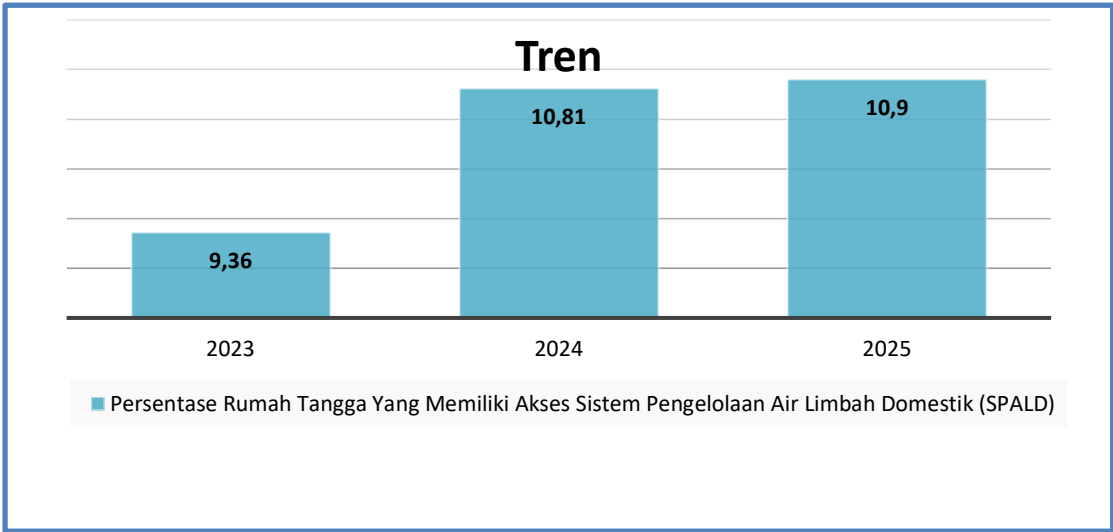
Sehingga tindak lanjut yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja Indikator Persentase Rumah tangga yang memiliki Akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), anta lain sebagai berikut :

- ❖ Merumuskan dan menetapkan tata kelola dan regulasi pengelolaan SPAM termasuk penyediaan lahan untuk pembangunan
- ❖ Sosialisasi kepada masyarakat untuk memakai jaringan perpipaan yang komunal / PDAM

- ❖ Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penyediaan air minum melalui sistem jaringan perpipaan serta penanganan air limbah domestik secara terpadu menggunakan jaringan perpipaan

7. Capaian kinerja Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Melalui SPALD

Indikator	Target			Realisasi		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	9,45	9.82	11,31	9,36	10,81	10,90



Indikator Persentase Rumah tangga yang memiliki Akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (SPALD) pada tahun 2023 mencapai realisasi sebesar 9,36%. Pada tahun 2024 terealisasi sebesar 10,81% yang mengalami kenaikan sebesar 1,45% jika dibandingkan tahun 2023. Sedangkan Pada tahun 2025 dengan target 11,31 % terealisasi 10,90 % dan mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2023 yang terealisasi 10,81 %.

Hal ini dikarenakan Sanitasi merupakan standar Pelayanan Minimum dan merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat yang menjadi priritas nasional dan kepedulian masyarakat dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan limbah domestik meningkat, walaupun target tahun 2025 tidak terealisasi;

Sedangkan faktor penghambat antara lain :

- ❖ Masih keterbatasannya ketersediaan lahan dan keberlanjutan untuk pengelolaan SPALD terbangun

Sehingga tindak lanjut yang diperlukan adalah :

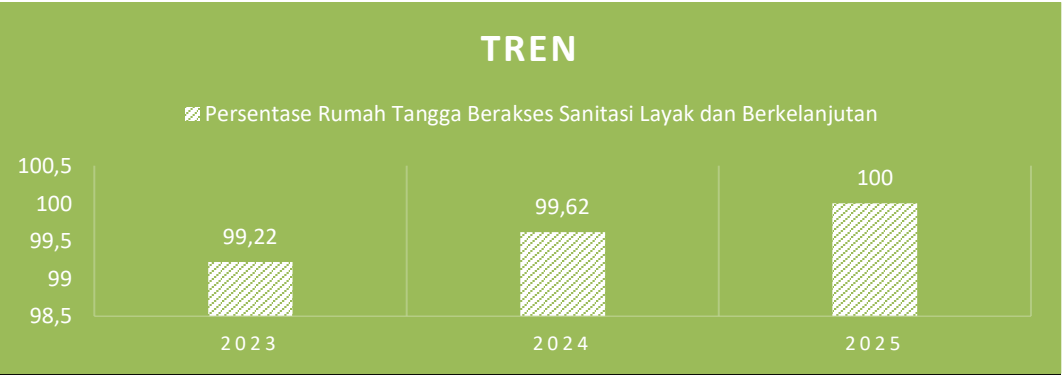
- ❖ Perlu penyediaan lahan untuk pembangunan SPALD guna pengelolaan Air Limbah Domestik

- ❖ Melakukan pembinaan Kelompok Masyarakat Pengelola guna meningkatkan peran kelompok masyarakat Pengelola

8. Capaian kinerja Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Pemukiman

- ❖ *Persentase Rumah tangga berakses Sanitasi Layak dan Berkelanjutan,*

Indikator	Target			Realisasi		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	97,00	99,26	100	99,22	99,62	100



Indikator Persentase Rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan pada tahun 2023 terealisasi sebesar 99,22% yang melebihi target sebesar 97,00%. Pada tahun 2024 tercapai realisasi sebesar 99,62 % yang mengalami kenaikan sebesar 0,40 % dibanding realisasi tahun 2023. Pada tahun 2025 dengan target **100 %** terealisasi **100 %** dan mengalami kenaikan sebesar 0,38% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang terealisasi **99,62 %**.

Hal ini dikarenakan pada tahun 2025 Sanitasi merupakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat yang menjadi prioritas Nasional yang didukung oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/M/2017 tentang penyelenggaraan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestikdan PMDN Nomor 59 tahun 2021 tentang SPM Adapun faktor penghambat dari Indikator Persentase Rumah Tangga berakses Sanitasi Layak dan berkelanjutan adalah :

- Keterbatasannya kesediaan kapasitas IPLT untuk menuju Sanitasi aman
- Keterbatasannya akses untuk penyedotan lumpur tinja

Sehingga tindak lanjut yang akan dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja yaitu :

- Penyusunan Dokumen Kajian Perluasan IPLT

- Penyusunan Kajian layanan IPLT yang tepat guna misalnya Updating dan pendampingan Aplikasi SIDOTI+, Layanan IPLT dengan menggunakan Program elektronik transaksi Pemerintah daerah (ETPD)
- Pengembangan Sistem Informasi SIAMALD (Sistem Informasi Jaringan Air Limbah Domestik berbasis GIS (Geografic Informations System / Sistem Informasi Geografis)

❖ *Persentase Rumah tangga berakses Air Minum Layak dan Berkelanjutan,*

Indikator	Target			Realisasi		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Persentase rumah tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	98.38	98.76	100	98.70	100	100



Indikator Persentase Rumah Tangga berakses Air Minum Layak dan Berkelanjutan pada tahun 2023 teralisasi 98.70% dari target 98.38%. Pada Tahun 2024 capaian kinerja terealisasi 100% dan mengalami kenaikan sebesar 1,30 % dari realisasi tahun 2023. Pada tahun 2025 dengan target **100 %** terealisasi **100 %** sama persis jika dibandingkan dengan tahun 2024.

Hal ini dikarenakan pada tahun 2025 semakin besarnya komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal melalui penyediaan akses air minum bagi masyarakat yang didukung oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/M/2017 tentang penyelenggaraan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestikdan PMDN Nomor 59 tahun 2021 tentang SPM

Adapun kendala / faktor penghambat yang dialami yaitu :

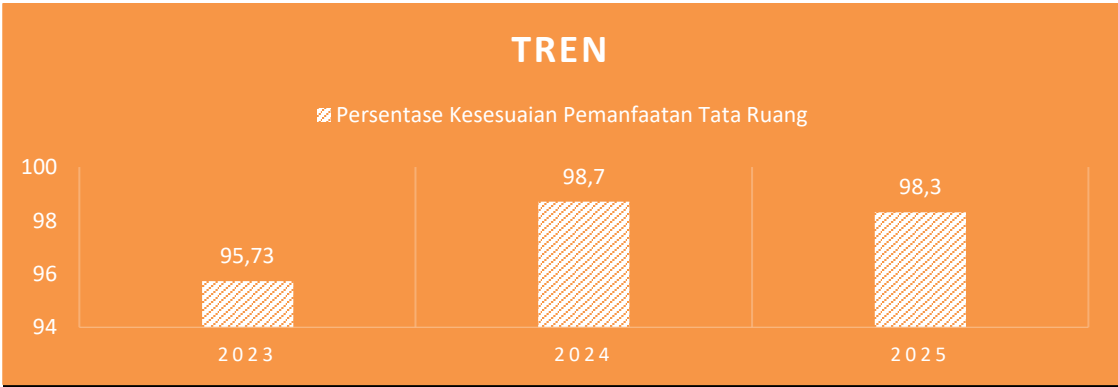
- Pembagian kewenangan penanganan antara SPAM Masyarakat dan PDAM yang perlu diperjelas
- Keterbatasannya pengetahuan atas keberlanjutan SPAM oleh masyarakat

Sehingga tindak lanjut yang akan dilakukan, yaitu sebagai berikut :

- Regulasi dan penataan jaringan perpipaan

9. Capaian kinerja Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang

Indikator	Target			Realisasi		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	95,40	95,45	99,20	95,73	98,70	98,30



Indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang pada tahun 2023 terealisasi sebesar 95,73%. Pada tahun 2024 capaian kinerja terealisasi sebesar 98,70% melebihi target sebesar 95,45%, realisasi di tahun 2024 mengalami kenaikan signifikan sebesar sebesar 3,25 % dibanding tahun 2023. Pada tahun 2025 dengan target **99.20 %** terealisasi **98.30 %** dan mengalami penurunan sebesar 0,50% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang terealisasi **98.30 %**.

Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 penerapan teknologi Aplikasi pendukung pencapaian kinerja , kerjasama Tim yang solid serta adanya koordinasi yang baik
Adapun faktor penghambat indikator Persentase Kesesuaian pemanfaatan Ruang adalah sebagai berikut :

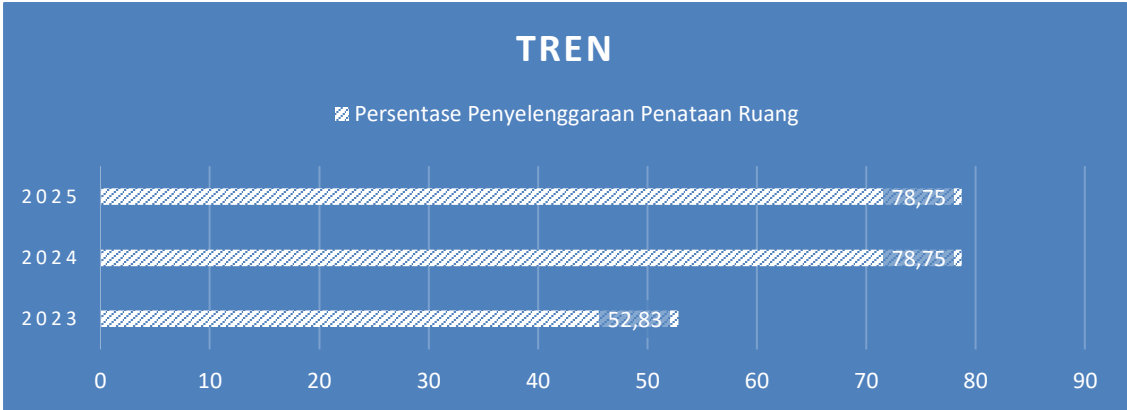
- ❖ Masih terdapat kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak memperhatikan rencana tata ruang

Sehingga tindakanlanjut yang harus dilakukan untuk meningkatkan tercapainya kinerja adalah :

- ❖ Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran tentang perlunya memperhatikan rencana tata ruang melalui Aplikasi SIMTARU yang berisi tentang Informasi tata ruang yang dapat diakses secara luas sebelum melaksanakan kegiatan

10. Capaian kinerja Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang

Indikator	Target			Realisasi		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	44,63	52.88	79,25	52,83	78.75	78,75



Indikator Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang pada tahun 2023 tercapai realisasi sebesar 52,83% . Pada tahun 2024 tercapai 78,75% yang mengalami kenaikan signifikan dengan selisih capaian realisasi sebesar 25,92%. Pada tahun 2025 dengan target **79,25 %** terealisasi **78.75 %**, sama persis jika dibandingkan dengan tahun 2024.

Hal ini dikarenakan pada tahun 2025 semakin semakin meningkatnya peran forum penataan ruang Kota Blitar dalam mendukung penyelenggaraan penataan ruang serta penerapan teknologi aplikasi pendukung pencapaian kinerja , kerja sama tim yang solid serta adanya koordinasi yang baik

Sedangkan faktor penghambat, antara lain :

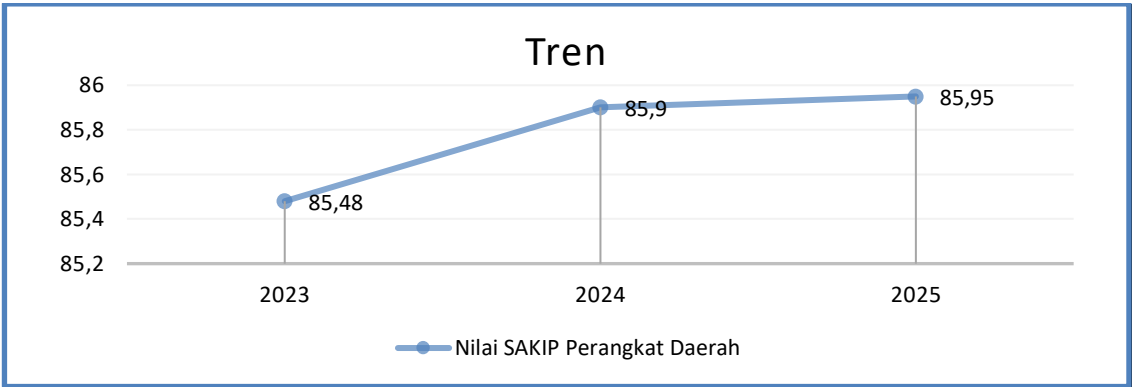
- ❖ Belum optimalnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang

Sehingga tindaklanjut yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan realisasi, adalah sebagai berikut :

- Segera melaksanakan proses penetapan revisi RTRW dan RDTR
- Menoptimalkan koordinasi antar dinas terkait
- Meningkatkan pelaksanaan pengendalian tata ruang

11. Capaian kinerja Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Indikator	Target			Realisasi		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A 85,50	A 85,50	A 85,95	A 85,48	A 85,90	A 85,97



Dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2023 terealisasi A (85,48) yang tidak mencapai target sebesar A (85,50) . Pada tahun 2024 nilai SAKIP yang dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kota Blitar sebesar A (85,90) yang melebihi target yang ditetapkan capaian realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 0,42 poin dibandingkan realisasi tahun 2023. Sedangkan pada tahun 2025 dengan nilai A (85,97) sesuai dengan target dan mengalami peningkatan sebesar 0,05 poin jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang mendapat nilai A (85,90)

Hal ini dikarenakan telah terpenuhinya beberapa indikator akuntabilitas kinerja yang telah ditentukan

Adapun permasalahan atau faktor penghambat antara lain :

- Publikasi atas dokumen perencanaan melalui website perangkat daerah yaitu <http://dinasupr.blitarkota.go.id> belum tepat waktu
- Pengumpulan data kinerja sebagian besar masih menggunakan cara manual atau teknologi sederhana (Excel) yang mengakibatkan data rawan hilang
- Pelaporan kinerja telah digunakan untuk perbaikan aktifitas dan evaluasi kinerja, namun ada penyesuaian penggunaan anggaran belum tertuang dalam dokumen perencanaan
- Hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi perhatian dan kepedulian bagi seluruh pegawai
- Belum optimalnya tindaklanjut rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kerja

Sehingga tindaklanjut yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan capaian realiasi adalah sebagai berikut :

- Melakukan publikasi dokumen perencanaan secara tepat waktu agar agar dapat dimanfaatkan secara lebih optimal
- Memanfaatkan teknologi informasi secara lebih optimal dalam pengumpulan data kinerja sehingga diperoleh data dukung kinerja yang lebih handal
- Memanfaatkan laporan pengukuran kinerja dalam penyesuaian penggunaan anggaran dan menuangkannya dalam dokumen perencanaan
- Memberikan informasi atas hasil pelaporan kinerja organisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Dinas pekerjaan Umum dan penataan Ruang
- Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja, perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Periode Renstra

Realisasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan 2025 bila dibandingkan dengan akhir periode Renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Tabel perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan akhir periode renstra 2021- 2026 disandingkan dengan renstra 2025-2029 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

SASARAN	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI s.d 2025	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5 = (4/3*100)
Meningkatnya kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indekss Infrastruktur Pekerjaan Umum	90,94	89,94	98,90
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bina Marga	Indekss Infrastruktur Bina Marga	83,26	84,87	101,93
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Indekss Infrastruktur Sumber Daya Air	99,25	94,37	95,08
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Cipta Karya*	Persentase Gedung Pemerintah Sesuai Standar	97,41	96,97	99,55
Meningkatnya Kompetensi Jasa Konstruksi*	Persentase Peran Aktif Jasa Konstruksi	80,50	83,33	103,52
Meningkatnya Akses Air Minum yang Layak Melalui SPAM*	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Penyediaan	4,11	3,75	91,24

SASARAN	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI s.d 2025	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5 = (4/3*100)
	Air Minum (SPAM)			
Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Melalui SPALD*	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	11,31	10,90	96,37
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana dan Utilitas di Kawasan Pemukiman*	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	100	100	100
	Persentase rumah tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	100	100	100
Meningkatnya kualitas penataan ruang*	Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	99,20	98,30	99,09
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang*	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	79,25	78,75	99,40
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A 85,95	A 85,97	100

Adapun Sasaran Kegiatan yang realisasi capaian Kinerjanya pada tahun 2025 melebihi target pada akhir periode renstra Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

- ❖ Sasaran **Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bina Marga** pada tahun 2025 terealisasi 84,87 % yang melebihi target pada akhir periode renstra 83,26 %, hal ini dikarenakan peran *stakeholder* dalam peningkatan infrastruktur; serta peningkatan kualitas pekerjaan dari penyedia jasa
- ❖ Sasaran **Meningkatnya Kompetensi Jasa konstruksi** pada tahun 2025 terealisasi 83,33 % yang melebihi target pada akhir periode renstra 80,50 %, hal ini dikarenakan meningkatnya tertib perizinan dan tertib administrasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi serta terlaksananya pekerjaan konstruksi yang tepat waktu, Tepat mutu dan tepat biaya.

Sementara itu Sasaran Kegiatan yang realisasi capaian Kinerjanya pada tahun 2025 sama dengan target pada akhir periode renstra Tahun 2021 – 2026 disandingkan dengan renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- ❖ Sasaran **Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Pemukiman** pada indikator **Prosentase rumah tangga berakses air**

minum layak dan berkelanjutan serta Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan pada tahun 2025 yang realisasinya 100 % sama dengan target pada akhir periode renstra yaitu sebesar 100 %. Hal ini dikarenakan adanya regulasi dan penataan jaringan perpipaan yang baik serta adanya pembinaan teknis KPSPAM dalam meningkatkan pengetahuan atas keberlanjutan SPAM.

❖ **Sasaran Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah** pada tahun 2025 terealisasi **85.95** yang sama dengan target pada akhir periode renstra A (81-90) .

Hal ini dikarenakan masih adanya beberapa permasalahan yang harus ditindaklanjuti antara lain :

- Publikasi atas dokumen perencanaan melalui website perangkat daerah yaitu <http://dinaspupr.blitarkota.go.id> belum tepat waktu
- Pengumpulan data kinerja sebagian besar masih menggunakan cara manual atau teknologi sederhana (Excel) yang mengakibatkan data rawan hilang
- Pelaporan kinerja telah digunakan untuk perbaikan aktifitas dan evaluasi kinerja, namun ada penyesuaian penggunaan anggaran belum tertuang dalam dokumen perencanaan
- Hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi perhatian dan kepedulian bagi seluruh pegawai
- Belum optimalnya tindaklanjut rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kerja

Adapun Sasaran Kegiatan yang realisasi capaian Kinerjanya pada tahun 2024 masih dibawah target pada akhir periode renstra Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut

❖ **Sasaran Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air** pada tahun 2025 Realisasi capaian sasaran pada tahun 2025 adalah sebesar 94,37%. Meskipun menunjukkan progres positif, capaian ini masih berada di bawah target akhir periode Renstra sebesar 99,25%, hal ini dikarenakan sebagian konstruksi jaringan irigasi telah melewati umur bangunan sehingga rawan mengalami kerusakan serta banyaknya sampah endapan di saluran irigasi, penurunan kapasitas fluktuasi debit pada titik-titik mata air akibat perubahan fungsi lahan di area tangkapan air.

❖ **Sasaran Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Cipta Karya** pada tahun 2025 terealisasi 96,97 % yang masih dibawah target pada akhir periode renstra 97,41 %, hal ini dikarenakan penyesuain peraturan pengajuan dokumen PBG dan SLF

❖ **Sasaran Meningkatkan Akses Sanitasi Layak Melalui SPALD** pada tahun 2025 terealisasi 10,90 % yang masih dibawah target pada akhir periode renstra 11,31 %, hal ini dikarenakan terbatasnya akses lahan untuk penyediaan lokasi fasum jaringan

air limbah dan kapasitas IPLT sebagai unit pengolah limbah tingkat kota.

- ❖ Sasaran **Meningkatnya Akses Air Minum yang Layak Melalui SPAM** pada tahun 2025 terealisasi 3,75 % yang masih dibawah target pada akhir periode renstra 4,11 %, hal ini dikarenakan terbatasnya akses lahan untuk penyediaan lokasi fasum jaringan sistem air minum.
- ❖ Sasaran **Meningkatnya kualitas penataan ruang** pada tahun 2025 terealisasi 98,30 % yang masih dibawah target pada akhir periode renstra sebesar 99,20 % hal ini dikarenakan kurangnya informasi dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan tata ruang dan status lahan yang ditempati.
- ❖ Sasaran **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang** pada tahun 2025 terealisasi 78,75 % yang masih dibawah target pada akhir periode renstra sebesar 79,25 % hal ini dikarenakan kurangnya informasi dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan tata ruang dan status lahan yang ditempati.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar yang menjadi bagian dari SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik

Pemenuhan kebutuhan pokok air minum dihitung berdasarkan jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi. Sedangkan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik melalui dua cara yaitu Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (SPALD-T).

Pada tahun 2025 dapat dilihat target realisasi SPM disandingkan dengan target pada Rencana Kerja (Renja) - Rancangan Akhir (Rankhir) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Kinerja SPM
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur
Dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar
Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi	%
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten / Kota	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap Sumber Air Minum yang layak	100	91,24	91,24
2.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi layak	100	96,37	96,37

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2025, pada Meningkatnya ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana dan utilitas di kawasan permukiman, indikator *Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap Sumber Air Minum yang layak* terealisasi 91.24 % dari target 100 % sehingga realisasinya menurun 8,76% dibandingkan tahun 2024 dengan capaian realisasi 100%. Adapun Tindakan untuk meningkatkan meningkatkan pencapaian rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan perlu diupayakan hal – hal sebagai berikut :

- ❖ Dilaksanakan optimalisasi pengembangan dan pengelolaan IPAL
- ❖ Dilaksanakan sosialisasi yang masif bagi pemerintah dan masyarakat akan pentingnya pengelolaan sanitasi yang layak

Sedangkan untuk indikator persentase rumah tangga berakses Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi layak terealisasi 96,37% dari target 100% sehingga realisasinya menurun 3,63% dibandingkan tahun 2024 dengan capaian realisasi 100%, penurunan capaian ini karena beberapa faktor pendukung di antaranya :

- ❖ Peran serta BUMD PDAM Perlunya pembagian regulasi pembagian kewenangan
- ❖ Peran serta masyarakat melalui penyediaan lahan untuk air minum berbasis masyarakat (SPAM masyarakat)

B. Akuntabilitas Keuangan (*Cost per Outcome*)

1. Alokasi per Sasaran Pembangunan

Untuk mencapai target kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

didukung dengan penganggaran yang dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.5
Alokasi Anggaran per Sasaran Pembangunan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar
Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	ANGGARAN
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bina Marga	Indekss Infrastruktur Bina Marga	Program penyelenggaraan jalan	9.493.921.532,00
Jumlah			9.493.921.532,00
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Indekss Infrastruktur Sumber Daya Air	Program pengelolaan sumber daya air	7.820.076.567,00
Jumlah			7.820.076.567,00
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Persentase Gedung Pemerintah Standar Sesuai	Program penataan bangunan gedung	9.388.632.271,45
		Program pengelolaan & pengembangan sistem drainase	4.807.271.449,52
Jumlah			14.195.903.720,97
Meningkatnya Kompetensi Jasa Konstruksi	Persentase Peran Aktif Jasa Konstruksi	Program pengembangan jasa konstruksi	612.177.100,00
Jumlah			612.177.100,00
Meningkatnya Akses Air Minum yang Layak Melalui SPAM	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Program pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	265.365.000,00
Jumlah			265.365.000,00
Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Melalui SPALD	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	1.074.295.180,00
Jumlah			1.074.295.180,00
Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.041.228.000,00

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	ANGGARAN
		Program Penyelenggaraan Sengketa Tanah garapan	16.400.000,00
		Program Penatagunaan tanah	268.580.000,00
Jumlah			1.326.208.000,00
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	7.832.734.666,03
Jumlah			7.832.734.666,03
TOTAL			42.620.681.766,00

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja juga didukung dengan realisasi anggaran. Pada tahun 2025 pencapaian kinerja dan realisasi anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar
Tahun 2025

Sasaran	Indikator	Program	Jumlah Anggaran	Prosentase Anggaran
1	2	3	4	
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bina Marga	Indekss Infrastruktur Bina Marga	Program penyelenggaraan jalan	9.493.921.532,00	22,27
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Indekss Infrastruktur Sumber Daya Air	Program pengelolaan sumber daya air	7.820.076.567,00	18,34
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Persentase Gedung Pemerintah Sesuai Standar	Program penataan bangunan gedung & Program pengelolaan & pengembangan sistem drainase	14.195.903.720,97	33,31
Meningkatnya Kompetensi Jasa Konstruksi	Persentase Peran Aktif Jasa Konstruksi	Program pengembangan jasa konstruksi	612.177.100,00	1,44
Meningkatnya Akses Air Minum yang Layak Melalui SPAM	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Penyediaan	Program pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	265.365.000,00	0,62

Sasaran	Indikator	Program	Jumlah Anggaran	Prosentase Anggaran
1	2	3	4	
	Air Minum (SPAM)			
Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Melalui SPALD	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	1.074.295.180,00	2,52
Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang ; Program Penyelenggaraan Sengketa Tanah garapan ; Program Penatagunaan tanah	1.326.208.000,00	3,11
Meningkatn ya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	7.832.734.666,00	18,39
			TOTAL	100%

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran dapat dilihat efisiensi penggunaan sumber daya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar
Tahun 2025

Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja	% Capaian Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5 = 3/4
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bina Marga	Indekss Infrastruktur Bina Marga	101,93	95,74	1.06
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Indekss Infrastruktur Sumber Daya Air	95,08	98,06	0.97

Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja	% Capaian Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5 = 3/4
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Persentase Gedung Pemerintah Sesuai Standar	99,55	94,14	1.06
Meningkatnya Kompetensi Jasa Konstruksi	Persentase Peran Aktif Jasa Konstruksi	103,52	73,42	1.40
Meningkatnya Akses Air Minum yang Layak Melalui SPAM	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	91,24	47,71	1.91
Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Melalui SPALD	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	96,37	84,95	1.13
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	99,40	84,85	1.17
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100,00	90,28	1.11

Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya di atas adalah sebagai berikut :

1. Sasaran 1 yaitu Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum

Dengan indikator Indekss Infrastruktur Pekerjaan Umum, tingkat efisiensi sebesar 1,05%, bahwa dengan capaian kinerja 98,90% membutuhkan anggaran sebesar 93,83 % dari total pagu anggaran Infrastruktur Pekerjaan Umum.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran ini dikatakan **EFISIEN**.

Dengan faktor pendukung antara lain :

- ❖ Peran stakeholder dalam peningkatan infrastruktur
- ❖ Adanya peran aktif masyarakat dalam musrenbang
- ❖ Peningkatan kualitas Pekerjaan dari penyedia jasa

2. Sasaran 2 yaitu Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Bina Marga

Dengan indikator kinerja Indekss Infrastruktur Bina Marga tingkat efisiensinya sebesar 1.06 %, bahwa dengan capaian kinerja 101,93 % membutuhkan anggaran sebesar 95,74 % dari total pagu anggaran penyelenggaraan jalan.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian pada sasaran ini dikatakan **EFISIEN** dengan Faktor Pendukung antara lain :

- ❖ Koordinasi yang masif dengan instansi terkait dalam mempercepat capaian

kinerja serta sinergitas antar stake holder

- ❖ Prasarana dan Sarana yang memadai,
- ❖ Kerjasama Tim yang solid

3. **Sasaran 3 yaitu Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air**

Dengan indikator kinerja Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air tingkat efisiensinya sebesar 0,97 % bahwa dengan capaian kinerja 95,08 % membutuhkan anggaran sebesar 98,06% dari total pagu anggaran pengelolaan sumber daya air. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian pada sasaran ini dikatakan **KURANG EFISIEN** dengan faktor penghambat antara lain :

- ❖ Berkurangnya lahan sawah saat pengukuran kinerja sehingga berdampak pada kondisi jaringan irigasi
- ❖ Beberapa jaringan irigasi mengalami kerusakan dikarenakan mencapai umur layanan maksimal

4. **Sasaran 4 yaitu Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Cipta Karya**

Dengan indikator kinerja Persentase Gedung Pemerintah Sesuai Standar tingkat efisiensinya sebesar 1,06%, bahwa dengan capaian kinerja 99,55 % membutuhkan anggaran sebesar 94,14% dari total pagu anggaran pengelolaan bangunan gedung. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian pada sasaran ini dikatakan **EFISIEN** dengan faktor pendukung antara lain :

- ❖ Terselenggaranya bangunan Gedung pemerintah yang memenuhi standar
- ❖ Penanganan pemenuhan standar bangunan yang teralokasikan di beberapa perangkat daerah selaku pengguna / pengelola

5. **Sasaran 5 yaitu Meningkatnya Kompetensi Jasa Konstruksi**

Dengan indikator kinerja Persentase Peran Aktif Jasa Konstruksi tingkat efisiensi sebesar 1,40%, bahwa dengan capaian kinerja 103,52% membutuhkan anggaran sebesar 73,42% dari total pagu anggaran pembinaan jasa konstruksi.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran ini dikatakan **EFISIEN** dengan faktor pendukung antara lain :

- ❖ Peran serta Badan Usaha dalam proses perijinan Jasa konstruksi
- ❖ Tertib perijinan dan tertib administrasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi
- ❖ Terlaksananya pekerjaan konstruksi yang tepat waktu , tepat mutu dan tepat biaya

6. **Sasaran 6 yaitu Meningkatnya Akses Air Minum yang Layak Melalui SPAM**

Dengan indikator kinerja Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tingkat efisiensi sebesar 1,91%, bahwa dengan capaian kinerja 91,24 % membutuhkan anggaran sebesar 47,71 % dari total pagu anggaran pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran ini dikatakan **EFISIEN** dengan faktor pendukung antara lain :

- ❖ Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia,
- ❖ Semakin besarnya komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk pelaksanaan SPM melalui penyediaan air minum bagi masyarakat
- ❖ Sarana dan prasarana yang memadai
- ❖ Penerapan Teknologi Aplikasi pendukung untuk Pencapaian Kinerja

7. **Sasaran 7 yaitu Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Melalui SPALD** dengan indikator kinerja Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) tingkat efisiensi sebesar 1,13%, bahwa dengan capaian kinerja 96,37% membutuhkan anggaran sebesar 84,95 % dari total pengelolaan air limbah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran ini dikatakan **EFISIEN**, dengan factor pendukung antara lain :

- ❖ Peran serta masyarakat dan seluruh stakeholder terkait;

8. **Sasaran 8 yaitu Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Pemukiman**

Dengan indikator *Persentase Rumah Tangga berakses Sanitasi Layak dan Berkelanjutan* , tingkat efisiensi sebesar 2,09%, bahwa dengan capaian kinerja 100% membutuhkan anggaran sebesar 47,71 % dari total pagu anggaran Pengelolaan Air Limbah . Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran ini dikatakan **EFISIEN**. Dengan factor pendukung antara lain :

- ❖ Sanitasi merupakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat yang menjadi prioritas Nasional yang didukung oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/M/2017 tentang penyelenggaraan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik dan PMDN Nomor 59 tahun 2021 tentang SPM ,

Dengan indikator *Persentase Rumah Tangga berakses Air Minum Layak dan Berkelanjutan* , tingkat efisiensi sebesar 1,17 %, bahwa dengan capaian kinerja 100%

membutuhkan anggaran sebesar 84,95 % dari total pagu anggaran Penyediaan air minum . Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran ini dikatakan **EFISIEN**. Dengan faktor pendukung antara lain :

- ❖ Semakin besarnya komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal melalui penyediaan akses air minum bagi masyarakat yang didukung oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/M/2017 tentang penyelenggaraan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik dan PMDN Nomor 59 tahun 2021 tentang SPM

9. Sasaran 9 yaitu Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang

Dengan indikator Persentase Kesesuaian pemanfaatan tata ruang , tingkat efisiensi sebesar 1,17%, bahwa dengan capaian kinerja 99,09% membutuhkan anggaran sebesar 84,85% dari total pagu anggaran Penataan Ruang. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran ini dikatakan **EFISIEN**.

Dengan factor pendukung antara lain :

- ❖ Penerapan teknologi aplikasi pendukung pencapaian kinerja
- ❖ Kerjasama tim yang solid serta adanya koordinasi yang baik ,

10. Sasaran 10 yaitu Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang

Dengan indikator Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang, tingkat efisiensi sebesar 1,17%, bahwa dengan capaian kinerja 99,40% membutuhkan anggaran sebesar 84,85% dari total pagu anggaran penyelenggaraan tata ruang. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran ini dikatakan **EFISIEN**.

Dengan factor pendukung antara lain :

- ❖ Penerapan teknologi aplikasi pendukung pencapaian kinerja ,
- ❖ Meningkatnya peran forum penataan ruang Kota Blitar dalam mendukung penyelenggaraan penataan ruang
- ❖ Prasarana dan Sarana yang memadai,
- ❖ Kerjasama Tim,
- ❖ Koordinasi yang baik

11. Sasaran 11 yaitu Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja

Nilai SAKIP Perangkat Daerah tingkat efisiensi sebesar 1,11%, bahwa dengan capaian kinerja 100% membutuhkan anggaran sebesar 90,28% dari total pagu anggaran penunjang urusan pemerintah daerah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian

sasaran ini dikatakan **EFISIEN** dengan factor pendukung antara lain :

- ❖ Peningkatan tertib administrasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan,
- ❖ Fasilitasi kantor yang memadai,
- ❖ Anggaran yang tersedia

C. Prestasi/Penghargaan

- ❖ Selama tahun 2025 tidak ada prestasi/penghargaan skala nasional maupun regional yang diperoleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Blitar,

BAB IV
P E N U T U P

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar berdasar pada akuntabilitas. LKjIP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan sebagai pendorong perwujudan *Good Governance*. Di lain pihak, LKjIP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.

Dari analisis capaian kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1. Sasaran 1 yaitu **Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum** dengan indikator Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dari target 90,94 % terealisasi 89,94 % atau tercapai 98,90 %.
- 2. **Sasaran 2 yaitu Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Bina Marga** dengan indikator Indeks infrastruktur Bina Marga dari target 83,26% telah terealisasi 84,87% pada tahun 2025 atau tercapai 101,93%.
- 3. **Sasaran 3 yaitu Meningkatkan Infrastruktur Sumber Daya Air** dengan indikator Indeks infrastruktur sumber daya air dari target 99,25% telah terealisasi 94,37% atau tercapai 95,08%.
- 4. **Sasaran 4 yaitu Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Cipta Karya** dengan indikator persentase gedung pemerintah sesuai standar dari target 97,41% terealisasi 96,97% atau tercapai 99,55%.
- 5. **Sasaran 5 yaitu Meningkatkan Kompetensi Jasa Konstruksi** dengan indikator persentase peran aktif jasa konstruksi dari target 80,50 % terealisasi 83,33 % atau tercapai 103,52 %.
- 6. **Sasaran 6 yaitu Meningkatkan Akses Air Minum yang Layak Melalui SPAM** dengan indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dari target 4,11 % terealisasi 3,75% atau tercapai 91,24 %.
- 7. **Sasaran 7 yaitu Meningkatkan Akses Sanitasi Layak Melalui SPALD** dengan indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dari target 11,31% terealisasi 10,90% atau tercapai 96,37%.

8. Sasaran 8 yaitu Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Pemukiman dengan indikator :
- ❖ Persentase Rumah Tangga berakses Sanitasi Layak dan Berkelanjutan dari target 100 % terealisasi 100 % atau tercapai 100 %.
 - ❖ Persentase Rumah Tangga berakses Air Minum Layak dan Berkelanjutan dari target 100 % terealisasi 100 % atau tercapai 100 %.
9. Sasaran 9 yaitu **Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang** dengan indikator Persentase Kesesuaian pemanfaatan tata ruang dari target 99,20 % terealisasi 98,30 % atau tercapai 99,09 %.
10. **Sasaran 10 yaitu Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang** dengan indikator persentase penyelenggaraan penataan ruang dari target 79,25 % terealisasi 78,75 % atau tercapai 99,40 %.
11. **Sasaran 11 yaitu Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah** dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dari target A (85,95) terealisasi A (85,97) atau tercapai 100 %.

Pada Tahun 2025 Alokasi Pagu Anggaran untuk Dinas pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kota Blitar sebesar Rp. 42.620.681.766,00,- (*Empat puluh dua milyar enam ratus dua puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 39.988.984.834,- (*Tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah*) atau sebesar 93,83 %. Mengacu pada capaian kinerja dan realisasi anggaran tahun 2025 maka efisiensi penggunaan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kota Blitar tahun 2025 sebesar **1,27**.

Secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja utama / Sasaran Strategis dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2024 dapat dikatakan **BAIK**, walaupun masih dijumpai banyak kendala/hambatan dalam pelaksanaannya baik secara langsung maupun tidak langsung di antaranya :

- ❖ Masih banyaknya kendaraan dengan beban overload yang melintas di ruas jalan yang tidak sesuai fungsi dan peruntukannya
- ❖ Sebagian konstruksi jaringan irigasi telah melewati umur bangunan sehingga rawan mengalami kerusakan

- ❖ Masih terdapat bangunan gedung yang sudah tidak memadai atau tidak sesuai dengan standar bangunan gedung antara lain ketentuan keandalan bangunan gedung yang meliputi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan untuk mendukung aktivitas kegiatan pelayanan
- ❖ Masih rendahnya tingkat kompetensi bagi pelaku jasa konstruksi
- ❖ Belum tersedianya tata kelola aset dan juga belum jelasnya pembagian kewenangan penyelenggaraan SPAM
- ❖ Keterbatasan kesediaan lahan untuk Sanitasi dan Air Minum
- ❖ Belum optimalnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
- ❖ Pengukuran kinerja yang belum maksimal dan sesuai dengan rumusan yang ditetapkan dalam perencanaan

B. Langkah Perbaikan

Dalam menghadapi permasalahan di atas, terdapat beberapa langkah perbaikan yang perlu dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu :

1. Optimalisasi rehabilitasi / pemeliharaan jalan
2. Peningkatan pemeliharaan rutin jaringan irigasi
3. Peningkatan ketersediaan dan kualitas bangunan gedung dan fasilitas umum
4. Peningkatan pelaksanaan pembinaan kepada pelaku jasa konstruksi
5. Optimalisasi pengelolaan air limbah domestik
6. Peningkatan akses air minum
7. Optimalisasi fungsi pengendalian penataan ruang
8. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja, perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

Adapun rencana tindak lanjut dan time line pelaksanaannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rencana Tindak lanjut dan Time Line Pelaksanaan
Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kota Blitar

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi / Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline
1	Optimalisasi rehabilitasi / pemeliharaan jalan	Peemeliharaan rutin dan berkala jalan dan jembatan sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan serta penanganan aduan masyarakat	Program : Penyelenggaraan Jalan Kegiatan : Penyelenggaraan jalan Kabupaten / Kota Sub Kegiatan : ❖ Pemeliharaan berkala jalan ❖ Pemeliharaan rutin jembatan ❖ Rehabilitasi jembatan ❖ Rehabilitasi jalan ❖ Pemeliharaan Rutin Jalan	- Tercapainya kemantapan jalan sesuai dengan perencanaan penanganan - Tertanganinya aduan masyarakat 100%	2026
2	Peningkatan pemeliharaan rutin jaringan irigasi	Peemeliharaan rutin dan berkala saluran irigasi dan fasilitas pendukungnya sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan serta penanganan aduan masyarakat	Program : Pengelolaan Sumber Daya Air Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem irigasi Primer dan Sekunder pada daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 daerah Kabupaten / Kota Sub Kegiatan : ❖ Pembangunan Jaringan Irigasi permukaan ❖ Peningkatan jaringan irigasi permukaan ❖ Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan	- Tercapainya saluran dan infrastruktur pendukung irigasi dalam kondisi baik - Tertanganinya aduan masyarakat 100%	2026

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi / Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline
3	Peningkatan ketersediaan dan kualitas bangunan gedung dan fasilitas umum	Monev pemeliharaan bangunan gedung dan fasilitasi umum dengan sertifikat laik fungsi / persetujuan bangunan gedung	Program : Penataan Bangunan Gedung Kegiatan : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Sub Kegiatan : ❖ Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	- Pelayanan pengajuan dokumen PBG & SLF tertangani 100% - Terciptanya proses pembangunan bangunan gedung dan fasilitas umum dengan zero accident	2026
4	Peningkatan pelaksanaan pembinaan kepada pelaku jasa konstruksi	Melaksanakan pembinaan kepada pelaku jasa konstruksi dengan bimbingan teknis dan bantuan sertifikasi kompetensi	Prgram : Pengembangan Jasa Konstruksi Kegiatan : Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Sub Kegiatan : ❖ Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi ❖ Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah pelaku jasa konstruksi yang bersterifikasi meningkat	2026
5	Optimalisasi pengelolaan air limbah domestik	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja , Pembangunan SPALD Terpusat, penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja , serta pembinaan	Program : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Meningkatnya nilai Kepuasan masyarakat pada Pelayanan sedot kakus, pengelolaan limbah, dan sejenisnya - Meningkatnya jumlah output penerima manfaat pembangunan	2026

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi / Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline
		dan pemberdayaan dalam pengembangan SPALD	Sub Kegiatan : ❖ Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) ❖ Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman ❖ Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja ❖ Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat ❖ Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	sambungan rumah atau fasilitas SPAL atau minimal sama dengan tahun berjalan	
6	Peningkatan Akses air minum	Sosialisasi kepada masyarakat untuk pemakaian jaringan perpipaan yang komunal / PDAM	Program : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	- Meningkatnya jumlah output penerima manfaat pembangunan sambungan rumah atau fasilitas SPAM dan SPALatau minimal sama dengan tahun berjalan	2026
7	Optimalisasi fungsi pengendalian penataan ruang	Penetapan kebijakan dalam rangka penataan ruang	Program : Penyelenggaraan penataan Ruang Kegiatan : ❖ Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota ❖ Koordinasi dan Sinkronisasi	Pengukuran Indeks SIWASTEK yang mengalami kenaikan signifikan	2026

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi / Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline
			Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota ❖ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : ❖ Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang ❖ Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota ❖ Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota ❖ Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang ❖ Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ❖ Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang ❖ Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang ❖ Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		
8	Memfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja, perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi	Monev akuntabilitas dalam upaya efektifitas dan efisiensi kinerja Perangkat daerah	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : ❖ Penyusunan Dokumen Perencanaan	- Nilai SKM mengalami peningkatan - Nilai kinerja SAKIP mengalami peningkatan	2026

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi / Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline
			Perangkat Daerah ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		

Demikian beberapa hal yang disampaikan dalam LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, semoga dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dalam mewujudkan Visi dan Misi Kota Blitar.

Blitar, 18 Februari 2026

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kota Blitar



Ir. ERNA SANTI, M. T
Pembina Utama Muda
NIP. 196705161998032004

LAMPIRAN A

MATRIKS PERUBAHAN RENSTRA DINAS PU & PENATAAN RUANG TAHUN 2021 – 2026

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 – 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal		Target Kinerja Tujuan / sasaran			Akhir Periode Renstra
						2021	2022	2024	2025	2026	
Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum		Indeks infrastruktur pekerjaan umum	Indikator ini menghitung capaian kualitas infrastruktur bina marga, kualitas infrastruktur sumber daya air dan kualitas infrastruktur cipta karya	50% Indeks Infrastruktur Bina Marga+40% Indeks Infrastruktur SDA+10% Indeks Infrastruktur Cipta Karya	Indeks		86,36	87,18	87,59	88	88
	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Bina Marga	Indeks infrastruktur Bina Marga	Indikator ini menghitung capaian sasaran panjang jalan beserta kelengkapannya yang tertangani dan dalam kondisi baik	Rata-rata penjumlahan persentase jalan dalam kondisi baik, jalan dengan bahu jalan, jalan dengan trotoar dan jalan dengan pelengkap jalan dalam kondisi baik	Indeks	76	76,20	76,60	76,80	77,00	77,00
	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks infrastruktur Sumber Daya Air	Indikator ini menghitung capaian sasaran sumber air dan Panjang saluran irigasi yang tertangani dan dalam kondisi baik	Rata-rata penjumlahan persentase saluran pengairan + persentase drainase dalam kondisi baik	Indeks	96	97,00	98,50	99,25	100,00	100,00
	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Persentase gedung Pemerintah sesuai standar	Indikator ini menghitung capaian sasaran gedung sesuai standar berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Jumlah bangunan gedung pemerintah yang sesuai standar dibagi jumlah total bangunan gedung pemerintah x 100%	%	75	94,60	94,80	94,90	95,00	95,00
	Meningkatnya kompetensi jasa konstruksi	Persentase peran aktif jasa konstruksi	Jasa konstruksi merupakan layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan	(Jumlah jasa konstruksi yang aktif dibagi jumlah total jasa konstruksi Kota Blitar) x 100%	%	NA	43,48	52,17	56,52	60,87	60.87

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal		Target Kinerja Tujuan / sasaran			Akhir Periode Renstra 2025
						2021	2022	2024	2025	2026	
			konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi dengan kriteria aktif yakni Selama Kurun waktu Renstra (5 Tahun) Jasa Konsultasi Berkontrak								
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman		Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	Proporsi penduduk atau rumah tangga dengan akses terhadap Fasilitas sanitasi yang layak adalah perbandingan antara penduduk atau rumah tangga yang memiliki akses terhadap Fasilitas sanitasi yang layak dengan penduduk atau rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase	jumlah rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan dibagi total jumlah rumah tangga x 100%	%		96	98	99	100	100
		Persentase Rumah Tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	Proporsi penduduk atau rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara penduduk atau rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan penduduk atau rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase	jumlah rumah tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan dibagi total jumlah rumah tangga x 100%	%		92	96	98	100	100
	Meningkatnya akses sanitasi	Persentase rumah Tangga yang memiliki akses Sistem	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah	(Jumlah rumah tangga yang memiliki akses	%	100	9,07	9,82	10,19	10,56	10.56

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal		Target Kinerja Tujuan / sasaran			Akhir Periode Renstra 2025
						2021	2022	2024	2025	2026	
	layak melalui SPALD	Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. SPALD dapat berupa SPALD Setempat dan Terpusat	SPALD dibagi jumlah rumah tangga) x 100%							
	Meningkatnya akses air minum yang layak melalui SPAM	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan (SPAM JP) menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, yakni satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan. SPAM JP diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas Air Minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran. Syarat SPAM JP meliputi: 1. Kuantitas Air Minum yang dihasilkan paling sedikit mencukupi Kebutuhan Pokok Air	(Jumlah rumah tangga yang memiliki akses SPAM dibagi jumlah rumah tangga) x 100%	%	100	2,45	2,95	3,19	3,44	3.44

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal		Target Kinerja Tujuan / sasaran			Akhir Periode Renstra 2025
						2021	2022	2024	2025	2026	
			Minum Sehari-hari. 2. Kualitas Air Minum yang dihasilkan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kontinuitas pengaliran Air Minum selama 24 (dua puluh empat) jam per hari.								
Meningkatnya kualitas penataan ruang		Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana pola ruang yang telah ditetapkan	luas lahan yang sesuai tata ruang dibagi total luas lahan	%		95,35	95,45	95,50	95,55	95.55
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang	Rata-rata penjumlahan persentase perencanaan penataan ruang + persentase pengendalian pemanfaatan ruang	%	94,57	40,55	48,72	54,12	58,21	58.21
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah adalah nilai hasil penilaian evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Evaluasi dilakukan dengan tujuan 1. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP. 2. Memantau dan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	NA	A (81-90)	A (81-90)	A (81-90)	A (81-90)	A (81-90)

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal		Target Kinerja Tujuan / sasaran			Akhir Periode Renstra 2025
						2021	2022	2024	2025	2026	
			menilai akuntabilitas kinerja instansi. 3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi. 4. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya								
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah adalah nilai hasil penilaian evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Evaluasi dilakukan dengan tujuan 1. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP. 2. Memantau dan menilai akuntabilitas kinerja instansi. 3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi. 4. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		84,43 (A)	85,50 (A)	85,75 (A)	86 (A)	

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : “Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT”			
Misi ke 4 : Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Bina Marga	Peningkatan ketersediaan dan kualitas jalan dan jembatan	Optimalisasi pemeliharaan jalan dan utilitasnya
			Peningkatan ketersediaan jalan dan utilitasnya
			Optimalisasi rehabilitasi dan rekonstruksi jalan dan utilitasnya
			Peningkatan ketersediaan jembatan
			Optimalisasi pemeliharaan jembatan
			Optimalisasi rehabilitasi jembatan
	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Peningkatan ketersediaan dan kualitas jaringan irigasi	Peningkatan ketersediaan jaringan irigasi
			Peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi
	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Peningkatan ketersediaan dan kualitas bangunan gedung	Pengembangan/kajian standarisasi pemeliharaan bangunan gedung
			Peningkatan ketersediaan bangunan gedung
		Optimalisasi penataan bangunan dan lingkungan	Peningkatan ketersediaan fasilitas umum skala kota
			Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas umum skala kota
	Meningkatnya kompetensi jasa konstruksi	Peningkatan kualitas jasa konstruksi	Peningkatan kapasitas tenaga konstruksi
			Peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi
			Peningkatan pengelolaan jasa konstruksi melalui sistem informasi

Visi : “Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT”			
Misi ke 4 : Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	Meningkatnya akses sanitasi layak melalui SPALD	Optimalisasi pengelolaan air limbah	Optimalisasi pengembangan dan pengelolaan IPAL
	Meningkatnya akses air minum yang layak melalui SPAM	Peningkatan akses air minum	optimalisasi pengelolaan dan pengembangan SPAM
Meningkatnya kualitas penataan ruang	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang	Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi tata ruang
			Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang sistem informasi tata ruang
			Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang
		Pengendalian pemanfaatan ruang	Peningkatan tindak lanjut terhadap penyimpangan peraturan tata ruang

Tabel 6.3

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar
Tahun 2024 – 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	50% Indeks Infrastruktur Bina Marga+40% Indeks Infrastruktur SDA+10% Indeks Infrastruktur Cipta Karya	Indeks	87,18		87,59		88		88			
		Indeks Infrastruktur Bina Marga	Rata-rata penjumlahan persentase jalan dalam kondisi baik, jalan dengan bahu jalan, jalan dengan trotoar dan jalan dengan	Indeks	76,6		76,8		77		77			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			pelengkap jalan dalam kondisi baik											
01.03.10	PROGRAM PENYELENG GARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi baik	(Panjang jalan dalam kondisi baik dan panjang bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik dibagi panjang total jalan) x 100%	%	99,6	8.913.435.000	99,8	9.359.106.000	100	9.827.062.000	100	36.588.587.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.10.2. 01	Kegiatan Penyelenggara an Jalan Kabupaten/Kot a	Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	(Panjang jembatan dalam kondisi baik dibagi jumlah total jembatan x 100%)	%	99,8	8.913.435.000	99,9	9.359.106.000	100	9.827.062.000	100	36.588.587.000	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Persentase jalan yang dipelihara dan direhabilitasi	(Panjang jalan dan panjang bangunan pelengkap jalan yang dipelihara dan direhabilitasi dibagi panjang total jalan) x 100%	%	5,09		5,09		5,09		5,09		Dinas PUPR	Kota Blitar
		Persentase jembatan yang dipelihara	(Jumlah jembatan yang dipelihara dibagi jumlah total jembatan) x 100%	%	6,12		6,12		6,12		6,12		Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Persentase jalan yang dibangun	(Panjang jalan yang dibangun dan panjang bangunan pelengkap jalan yang dibangun dibagi panjang jalan dan bangunan pelengkap jalan yang seharusnya dibangun) x 100%	%	100		100		100		100		Dinas PUPR	Kota Blitar
		Persentase jembatan yang dibangun	(Jumlah jembatan yang dibangun dibagi jumlah jembatan yang seharusnya dibangun) x 100%	%	100		100		100		100		Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.03.10.2. 01.0029	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategis dan Tekhnis Pengembang an Jaringan Jalan serta Perencanaan teknis Penyelenggara an Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana Kebijakan, Strategis dan Tekhnis Pengemban gan Jaringan Jalan serta Perencanaa n teknis Penyelengg araan Jalan dan Jembatan yang disusun	Jumlah Dokumen Rencana Kebijakan, Strategis dan Tekhnis Pengemban gan Jaringan Jalan serta Perencanaa n teknis Penyelengg araan Jalan dan Jembatan yang tersusun	dokume n	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	12	2.000.000.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.10.2. 01.0032	Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	Panjang jalan yang dibangun	km	0	0	0,5	200.000.000	0,5	200.000.000	1	400.000.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.10.2. 01.0034	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaa n secara berkala	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaa n secara berkala	km	2	3.296.102.000	2	3.196.102.000	2	3.296.102.000	8	11.029.922.674	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.03.10.2. 01.0038	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara secara rutin	Jumlah jembatan yang dipelihara secara rutin	Jembata n	400	84.279.000	400	57.099.000	400	57.099.000	1.600, 00	298.477.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.10.2. 01.0039	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi	Jumlah jembatan yang direhabilitasi	Jembata n	3	428.940.000	3	401.791.000	3	469.747.000	12	1.866.508.334	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.10.2. 01.0040	Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang dibangun	Panjang Jembatan yang dibangun	Jembata n	20	443.880.000	20	443.880.000	20	443.880.000	80	1.775.520.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.10.2. 01.0044	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	Panjang jalan yang direhabilitasi	km	1	3.420.125.000	1	4.020.125.000	1	4.120.125.000	4	16.447.831.992	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.10.2. 01.0046	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaa n secara rutin	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaa n secara rutin	km	1	740.109.000	1	540.109.000	1	740.109.000	4	2.770.327.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
		Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air	Rata-rata penjumlahan persentase	Indeks	98,5		99,25		100		100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			jaringan irigasi dan sumber air dalam kondisi baik											
01.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	(Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik dibagi panjang total jaringan irigasi) x 100%	%	98	13.648.553.000	99	14.330.981.000	100	15.047.530.000	100	56.025.686.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.02.2. 02	Kegiatan Pengembang an dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah	Persentase jaringan irigasi yang dilakukan peningkatan dan pemeliharaa n	(Panjang jaringan irigasi yang dilakukan peningkatan dan pemeliharaa n dibagi panjang total jaringan irigasi) x 100%	%	14,22	13.648.553.000	18,05	14.330.981.000	21,89	15.047.530.000	21,89	56.025.686.000	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Kabupaten/Kot a													
1.03.02.2. 02.0035	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa yang tersusun	Jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa yang tersusun	dokume n	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	12	1.200.000.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.02.2. 02.0002	Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun	km	0,346	3.800.000.000	0,346	3.921.395.000	0,346	3.978.000.000	1,38	15.400.690.016	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.02.2. 02.0008	Sub Kegiatan Peningkatan	Panjang jaringan	Panjang jaringan	km	1.743	2.150.304.000	1.743	2.522.279.000	1.743	2.656.000.000	6.972	12.293.285.120	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Jaringan Irigasi Permukaan	irigasi permukaan yang ditingkatkan	irigasi permukaan yang ditingkatkan											
1.03.02.2. 02.0014	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	km	2.500	3.781.176.000	2.500	3.970.234.000	2.500	4.368.747.000	7.500	12.120.157.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.02.2. 02.0021	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	km	3.054	3.617.073.000	3.054, 00	3.617.073.000	3.054	3.744.783.000	12.216	15.011.553.864	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.02.2. 02.0035	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tekhnis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang	Dokume n	3	450.000.000,00	3	459.000.000,00	3	468.180.000,00	9	927.180.000,00	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Disusun	Disusun pada tahun n											
		Persentase gedung pemerintah sesuai standar DIHAPUS ...DOUBLE	Jumlah bangunan gedung pemerintah yang sesuai standart dibagi jumlah total bangunan gedung pemerintah x 100%	%	94,8		94,9		95		95			
01.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung pemerintah n yang dibangun	Jumlah gedung pemerintah yang dibangun dibagi kebutuhan gedung pemerintah x 100%	%	91,67	7.549.955.000	95,83	7.846.750.000	100	8.158.417.500	100	30.922.222.500	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Persentase fasilitas umum skala kota yang dibangun	(Jumlah fasilitas umum yang terbangun dibagi jumlah kebutuhan fasilitas umum) x 100%	%	91,3		95,65		100		100		Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.08.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase persetujuan bangunan gedung yang diterbitkan	(Jumlah persetujuan bangunan gedung yang diterbitkan dibagi jumlah pengajuan persetujuan bangunan gedung) x 100%	%	100	7.549.955.000	100	7.846.750.000	100	8.158.417.500	100	30.922.222.500	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.08.2.01.0019	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan terkait	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait	dokumen	1	212.455.000	1	212.455.000	1	212.455.000	3	637.365.000	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	Penyelenggara an Bangunan Gedung	Penyelengg araan Bangunan Gedung	Penyelengg araan Bangunan Gedung pada tahun n											
1.03.08.2. 01.0020	Sub Kegiatan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kot a	Jumlah Bantuan Teknis Pembangun an Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/ Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangun an Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/ Kota pada tahun n	dokume n	5	100.000.000	7	100.000.000	8	100.000.000	23	400.000.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.08.2. 01.0021	Sub kegiatan Pembangunan , Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkara n Bangunan Gedung untuk	Jumlah Dokumen Pembangun an, Pemanfaata n, Pelestariaan dan Pembongkar	Jumlah Dokumen Pembangun an, Pemanfaata n, Pelestariaan dan Pembongkar	dokume n	2	6.737.500.000	2	7.034.295.000	2	7.345.962.500	8	27.679.043.632	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	an Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	an Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota pada tahun n											
1.03.08.2. 01.0023	Sub Kegiatan Penyelenggara an Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Tekhnis Pembongkara n Bangunan Gedung (RTB), Tim	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Tekhnis Pembongkar an Bangunan Gedung	Jumlah dokumen yang diterbitkan	dokume n	5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	20	2.205.813.868	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Tekhnis (TPT) Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	(RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Tekhnis (TPT) Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG												
		Persentase peran aktif jasa konstruksi	(Jumlah jasa konstruksi yang aktif dibagi jumlah total jasa konstruksi Kota Blitar) x 100%	%	52,17		56,52		60,87		60,87			
01.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pekerjaan konstruksi yang sesuai	(Jumlah pekerjaan konstruksi yang sesuai	%	100	410.200.000	100	428.800.000	100	448.125.000	100	1.764.625.000	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		standar	standar dibagi jumlah pekerjaan konstruksi) x 100%											
1.03.11.2. 01	Kegiatan Penyelenggara an Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	(Jumlah tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat dibagi jumlah tenaga konstruksi) x 100%	%	85,79	135.000.000	94,56	153.600.000	100	155.000.000	100	716.990.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.11.2. 01.0010	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Tekhnisi atau Analisis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis yang tersertifikasi	orang	100	70.000.000	100	88.600.000	100	75.000.000	400	352.327.165	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.03.11.2. 01.0011	Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya pada tahun n	Orang	250	65.250.000	250	65.000.000	250	80.000.000	1.000,00	364.662.835	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.11.2. 04	Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase pengawasan jasa konstruksi	(Jumlah dokumen SOP dibagi jumlah jasa konstruksi) x 100 %	%	100	135.200.000	100	135.200.000	100	140.000.000	100	520.400.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.11.2. 04.0006	Sub Kegiatan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan	Lembaga	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	3	195.000.000	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Tertib Pemanfaata n Produk	Tertib Pemanfaata n Produk pada tahun n											
1.03.11.2. 04.0008	Sub Kegiatan Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggara an dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/pedom an tertib usaha, tertib penyelengg araan dan tertib pemanfaata n jasa konstruksi	Jumlah dokumen SOP/pedom an tertib usaha, tertib penyelengg araan dan tertib pemanfaata n jasa konstruksi yang tersusun	dokume n	2	70.200.000	2	70.200.000	2	75.000.000	8	325.400.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.11.2. 02	Kegiatan Penyelenggara an Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase jasa konstruksi yang termuat dalam SIPJAKI	(Jumlah jasa konstruksi yang termuat dalam SIPJAKI dibagi jumlah jasa konstruksi) x 100%	%	60	140.000.000	80	140.000.000	100	153.125.000	100	527.235.000	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.03.11.2. 02.0012	Sub Kegiatan Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan pada tahun n	Perangk at penduku ng	2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.125.000	8	258.075.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.11.2. 02.0013	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/ Kota yang Disediakan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/ Kota yang Disediakan pada tahun n	dokume n	4	70.000.000	4	70.000.000	4	83.000.000	16	269.160.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
		Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi layak dan	jumlah rumah tangga berakses sanitasi layak dan	%	98		99		100		100		Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		berkelanjuta n	berkelanjuta n dibagi total jumlah rumah tangga x 100%											
		Persentase rumah Tangga yang memiliki akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	(Jumlah rumah tangga yang memiliki akses SPALD dibagi jumlah rumah tangga) x 100%	%	9,82		10,19		10,56		10,56		Dinas PUPR	Kota Blitar
01.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dalam kondisi baik	(Jumlah rumah tangga yang memiliki akses SPALD dibagi jumlah rumah tangga) x 100%	%	84	1.421.354.000	85	1.492.422.000	86	3.074.535.471	86	7.341.982.471	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.03.05.2.01	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase SPALD yang terbangun	(Jumlah jaringan air limbah yang terbangun dibagi kebutuhan jaringan air limbah) x 100%	%	78,95	1.421.354.000	89,47	1.492.422.000	100	3.074.535.471	100	7.341.982.471	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.05.2.01.0019	Sub Kegiatan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisa si	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisa si	Unit	20	482.567.000	20	325.000.000	20	725.000.000	80	1.502.610.312	Dinas PUPR	
1.03.05.2.01.0022	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	M³/Hari	10	125.000.000	10	125.000.000	10	175.000.000	40	574.000.000	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			pada tahun n											
1.03.05.2. 01.0032	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terpusat skala permukiman yang ditingkatkan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terpusat skala permukiman yang ditingkatkan	MÂ³/Hari	50	222.994.000	50	250.000.000	50	942.000.000	200	1.617.774.000	Dinas PUPR	
1.03.05.2. 01.0033	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah tangga	200	814.649.200	36	40.000.000	36	40.000.000	144	145.335.200	Dinas PUPR	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.03.05.2. 01.0038	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	jumlah sistem pengelolaan air limbah domestik yang dioperasikan dan dipelihara	jumlah sistem pengelolaan air limbah domestik yang dioperasikan dan dipelihara	unit	2	135.000.000	2	150.000.000	2	170.000.000	8	555.000.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.05.2. 01.0039	Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik sesuai dengan Standar	Jumlah rumah tangga yang memiliki tangki septik	rumah tangga	25	384.000.000	25	393.062.000	25	813.175.471	100	2.060.437.362	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.05.2. 01.0040	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaa n Masyarakat dalam Pengembanga n Sistem Pengelolaan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayaka n dalam Pengemban gan Sistem Pengelolaan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayaka n dalam Pengemban gan Sistem Pengelolaan	orang	10	80.000.000	10	80.000.000	10	80.000.000	30	240.000.000	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Air Limbah Domestik (SPALD)	Air Limbah Domestik (SPALD)	Air Limbah Domestik (SPALD) pada tahun n											
1.03.05.2. 01.0041	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPALD yang disusun	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPALD yang tersusun	dokume n	1	109.360.000	1	129.360.000	1	129.360.000	4	646.825.597	Dinas PUPR	Kota Blitar
01.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	(Panjang saluran drainase dalam kondisi baik dibagi panjang total saluran drainase) x 100%	%	99	3.962.428.000	99,5	4.160.550.000	100	4.368.577.000	100	16.265.296.000	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.03.06.2. 01	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembanga n Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase saluran drainase rusak yang terpelihara	(Panjang saluran drainase rusak yang dipelihara dibagi panjang saluran drainase) x 100%	%	1,64	3.962.428.000	1,93	4.160.550.000	2,21	4.368.577.000	2,21	16.265.296.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.06.2. 01.0026	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang disediakan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang disediakan	unit	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	7	1.008.860.220	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.06.2. 01.0028	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitas i	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitas i	Sistem drainase	200	1.325.000.000	10	525.000.000	10	525.000.000	20	3.289.622.470	Dinas PUPR	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.03.06.2. 01.0029	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah sistem drainase perkotaan yang dibangun	Jumlah sistem drainase perkotaan yang dibangun	Sistem drainase	1.500	2.614.608.000	16	2.812.730.000	16	3.020.757.000	32	9.990.579.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.06.2. 01.0030	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	jumlah dokumen rencana kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase perkotaan yang disusun	Jumlah dokumen yang tersusun	dokume n	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	3	525.000.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.06.2. 01.0031	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah sistem drainase perkotaan yang dioperasikan dan dipelihara	Jumlah sistem drainase perkotaan yang dioperasikan dan dipelihara	Sistem drainase	400	347.820.000	3	347.820.000	3	347.820.000	6	1.451.234.310	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Persentase Rumah Tangga berakses air minum layak dan berkelanjuta n	jumlah rumah tangga berakses air minum layak dan berkelanjuta n dibagi total jumlah rumah tangga x 100%	%	96		98		100		100			
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses SPAM	(Jumlah rumah tangga yang memiliki akses SPAM dibagi jumlah rumah tangga) x 100%		2,95		3,19		3,44		3,44			
01.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN	Persentase Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam	(Jumlah SPAM dalam kondisi baik dibagi jumlah total	%	90	1.277.355.000	90,1	1.341.223.000	90,2	1.408.284.000	90,2	5.243.389.000	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	AIR MINUM	kondisi baik	SPAM) x 100%											
1.03.03.2. 01	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembang an Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase SPAM yang terbangun	(Jumlah SPAM yang terbangun dibagi kebutuhan SPAM) x 100%	%	78,95	1.277.355.000	89,47	1.341.223.000	100	1.408.284.000	100	5.243.389.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.03.2. 01.0025	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	dokume n	1	225.000.000	1	225.000.000	1	225.000.000	4	1.455.582.860	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.03.2. 01.0026	Sub Kegiatan Peningkatan	kapasitas sistem	kapasitas sistem	liter/deti k	15	552.355.000	15	653.798.000	15	653.798.000	60	2.195.895.140	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan yang ditingkatkan	penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan yang ditingkatkan											
1.03.03.2. 01.0028	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas SPAM Jaringan perpipaan yang dibangun	Kapasitas SPAM Jaringan perpipaan yang dibangun	liter/deti k	15	350.000.000	15	312.425.000	15	379.486.000	45	1.041.911.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.03.2. 01.0029	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah sistem penyediaan air minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara	Jumlah sistem penyediaan air minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara	unit	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	8	550.000.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
		Persentase kesesuaian pemanfaata n tata ruang	luas lahan yang sesuai tata ruang dibagi total	%	95,45		95,5		95,55		95,55			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			luas lahan											
		Persentase penyelengg araan penataan ruang	Rata-rata penjumlaha n persentase perencanaa n penataan ruang + persentase pengendalia n pemanfaata n ruang	%	48,72		54,12		58,21		58,21			
01.03.12	PROGRAM PENYELENG GARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaa n dokumen tata ruang	(Jumlah dokumen tata ruang yang disusun dibagi jumlah kebutuhan dokumen tata ruang) x 100%	%	86,84	685.000.000	94,75	945.000.000	100	750.000.000	100	3.810.000.000	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.03.12.2.01	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kot a	Persentase persetujuan substansi, evaluasi dan penetapan RTRW dan RRTR Kota	(Jumlah dokumen substansi, evaluasi dan penetapan yang disetujui dibagi jumlah dokumen substansi, evaluasi dan penetapan yang direncanaka n) x 100%	%	100	185.000.000	100	275.000.000	100	195.000.000	100	800.260.469	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.12.2.01.0003	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perka da selain RTRW Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perka da selain RTRW Kabupaten/ Kota	Dokume n	1	75.000.000	2	100.000.000	2	75.000.000	6	250.000.000	Dinas PUPR	
1.03.12.2.01.0005	Sub Kegaiaitan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW	Dokume n	1	291.911.500	1	297.749.730,00	1	303.704.725,00	3	601.454.455,00	Dinas PUPR	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota											
1.03.12.2.01.0006	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	4	125.995.000	1	100.000.000	2	70.000.000	7	375.260.469	Dinas PUPR	
1.03.12.2.01.0012	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan Ruang	laporan	1	50.000.000	1	75.000.000	1	50.000.000	3	175.000.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.12.2.02	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tata Ruang	(Jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang tersedia	%	100	200.000.000	100	300.000.000	100	245.000.000	100	1.381.048.418	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Kabupaten/Kot a		dibagi jumlah dokumen tata ruang yang harus ada) x 100%											
1.03.12.2. 02.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kot a	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW kabupaten/k ota	Jumlah dokumen materi teknis RTRW dan RRTR yang tersusun	dokume n	2	200.000.000	2	300.000.000	2	245.000.000	8	1.381.048.418	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.12.2. 03	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase Ketersediaa n Sistem Informasi Tata Ruang	(Jumlah sistem informasi yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan sistem informasi) x 100%	%	100	145.000.000	100	175.000.000	100	160.000.000	100	803.393.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.12.2. 03.0004	Sub Kegiatan Pelaksanaan	Jumlah layanan	Jumlah layanan	Layanan	500	99.360.000	500	101.347.200,00	500	103.374.144,00	1500	204.721.344,00	Dinas PUPR	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku											
1.03.12.2. 03.0005	Sub Kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaata n ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaata n ruang	Dokume n	12	150.000.000	12	100.000.000	12	80.000.000	48	406.000.000	Dinas PUPR	
1.03.12.2. 03.0006	Sub Kegiatan Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	Jumlah sistem informasi yang dihasilkan dari sistem informasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi yang dihasilkan dari sistem informasi penataan ruang yang tersusun	sistem	1	70.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	4	397.393.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.12.2. 04	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan	Persentase Ketidaksesu aian Tata Ruang yang Ditindaklanj	(Jumlah pelanggaran tata ruang yang ditindaklanju	%	100	155.000.000	100	195.000.000	100	150.000.000	100	825.298.113	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Ruang Daerah Kabupaten/Kot a	uti	ti dibagi jumlah pelanggaran tata ruang) x 100%											
1.03.12.2. 04.0004	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaa n Penataan Ruang	Jumlah dokumen pelaksanaan penataan ruang yang tersusun	dokume n	3	8.000.000.000	3	95.000.000	3	75.000.000	14	575.298.113	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.12.2. 04.0008	Sub Kegiatan Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaa n Kesesuaian Kegiatan Pemanfaata n Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaa n Kesesuaian Kegiatan Pemanfaata n Ruang	Dokume n	1	76.098.000	1	77.619.960,00	1	79.172.359,00	3	156.792.319,00	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.12.2. 04.0009	Sub Kegiatan Operasionalisa si Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaa n Tugas dan Fungsi Forum	Jumlah Laporan Pelaksanaa n Tugas dan Fungsi Forum	Laporan	12	107.960.000	12	110.119.200,00	12	112.321.584,00	12	222.440.784,00	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penataan Ruang	Penataan Ruang											
1.03.12.2.04.0012	Sub Kegiatan Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Dokumen	4	200.000.000	4	204.000.000,00	4	208.080.000,00	12	412.080.000,00	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.12.2.04.0015	Sub Kegiatan Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Berita acara	1	75.000.000	1	100.000.000	1	75.000.000	3	250.000.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
02.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase kasus pertanahan yang ditindaklanjuti	(Jumlah kasus pertanahan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah kasus pertanahan) x 100%	%	100	50.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	105.000.000	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.10.04.2.01	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sengketa tanah garapan yang ditindaklanjuti sesuai regulasi	(Jumlah sengketa tanah garapan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah sengketa tanah garapan) x 100%	%	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	165.750.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
2.10.04.2.01.0002	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan yang ditindaklanjuti	berita acara	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4	165.750.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
	PROGRAM PENATAGUN AAN TANAH	Persentase Tanah Aset Pemerintah Kota	(Jumlah tanah aset Pemerintah Kota yang	%	98	265.000.000	99	300.000.000	100	310.000.000	100	1.410.000.000	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Bersertifikat	bersertifikat dibagi jumlah tanah aset Pemerintah Kota) x 100%											
2.10.10.2.01	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Pertanahan yang Tersusun	(Jumlah dokumen pertanahan yang disusun dibagi jumlah dokumen pertanahan yang direncanakan) x 100%	%	98	265.000.000	99	300.000.000	100	310.000.000	100	1.410.000.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
2.10.10.2.01.0001	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1	Jumlah laporan yang tersusun	laporan	1	60.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	4	390.000.000	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		(Satu) Kabupaten/ Kota												
2.10.10.2. 01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaa n Konsolidasi Tanah Kewenanga n Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen yang tersusun	dokume n	1	205.000.000	1	240.000.000	1	240.000.000	4	1.020.000.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
		Nilai SAKIP PD	Nilai SAKIP PD	Nilai	85,50 (A)		84,75 (A)		86 (A)		86 (A)			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun berjalan	Nilai	82,8 (A)	6.650.865.000	82,9 (A)	6.983.651.100	83 (A)	11.163.143.755	83 (A)	31.130.865.855	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.03.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	(Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar dibagi jumlah jenis dokumen Perencanaan dan Pelaporan PD yang harus disusun) x 100%	%	100	22.350.000	100	22.350.000	100	65.590.000	100	127.366.148	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun pada tahun bersangkutan	dokumen	10	7.350.000	10	7.350.000	10	25.150.000	40	41.926.148	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.03.01.2. 01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah jenis pelaporan perangkat daerah yang tersusun pada tahun bersangkutan	laporan	1	15.000.000	1	15.000.000	1	40.440.000	4	85.440.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.01.2. 02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	(Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlayani sesuai standar dibagi Jumlah Administrasi	%	100	5.360.108.478	100	5.433.108.478	100	6.515.648.478	100	22.637.891.772	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Keuangan Perangkat Daerah yang harus dilayani) x 100%											
1.03.01.2. 02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan a pada tahun bersangkuta n	orang/bu lan	36	5.357.858.478	36	5.427.858.478	36	6.497.858.478	144	22.611.433.912	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.01.2. 02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan/triw ulanan/sem esteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triw ulanan/sem	Jumlah jenis laporan keungan yang disusun pada tahun bersangkuta n	laporan	5	2.250.000	5	5.250.000	5	17.790.000	20	26.457.860	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		esteran SKPD												
1.03.01.2. 05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaia n perangkat daerah yang sesuai standar	(Jumlah jenis administrasi kepegawaia n perangkat daerah yang terlayani sesuai standar dibagi jumlah jenis administrasi kepegawaia n perangkat daerah yang harus dilayani) x 100%	%	100	175.259.122	100	185.272.622	100	310.520.000	100	750.879.994	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.01.2. 05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapann	jumlah paket pakaian dinas beserta atribut	Jumlah publikasi program / kegiatan perangkat	paket	3	80.914.122	3	90.927.622	3	175.520.000	12	407.569.994	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	ya	kelengkapan	daerah											
1.03.01.2. 05.0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang	60	94.345.000	60	94.345.000	60	135.000.000	240	343.310.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.01.2. 06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaa n administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	(Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar dibagi jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan) x 100%	%	100	337.398.000	100	378.498.000	100	1.364.102.277	100	2.372.361.941	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.01.2. 06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	jumlah paket komponen instalasi listrik/penera	Jumlah komponen instalasi listrik/penera	paket	5	14.655.000	5	14.655.000	5	132.000.000	20	171.884.080	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	/ Penerangan Bangunan Kantor	ngan bangunan kantor yang disediakan	ngan bangunan kantor yang disediakan											
1.03.01.2. 06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengka n kantor yang disediakan	Jumlah peralatan dan perlengka n kantor yang disediakan	paket	11	35.205.000	11	35.205.000	11	212.680.000	44	317.845.308	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.01.2. 06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	12	5.000.000	12	5.000.000	12	78.250.000	48	91.216.868	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.01.2. 06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	43.097.000	4	83.97.000,00	4	123.097.000	16	270.256.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.01.2. 06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengganda an yang	Jumlah varang cetakan dan pengganda an yang disediakan	Paket	2	16.065.000	2	16.065.000	2	24.128.000	8	72.235.408.000	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		disediakan												
1.03.01.2. 06.0006	Sub kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundanga n – undangan yang disediakan	Dokume n	24	7.476.000	24	7.476.000	24	8.947.277.00	96	30.499.277	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.01.2. 06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	80	195.900.000	80	197.000.000	80	700.000.000	320	1.288.050.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.01.2. 06.0010	Sub Kegiatan Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausah aan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausah aan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokume n	100	20.000.000	100	20.000.000	100	85.000.000	400	130.375.000	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.03.01.2. 07	Kegiatan Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	(Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia dibagi jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan) x 100%	%	100	150.000.000	100	150.000.000	100	907.250.000	100	1.304.915.600	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.01.2. 07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Jumlah unit paket mebel yang disediakan	Unit	32	100.000.000	32	100.000.000	32	450.000.000	128	710.110.400	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.01.2. 07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya	unit	8	50.000.000	8	50.000.000	8	457.250.000	32	594.805.200	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
.03.01.2.0 8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	(Jumlah penunjang urusan pemerintah n daerah yang tersedia sesuai standar dibagi jumlah penunjang urusan pemerintah n yang harus disediakan) x 100%	%	100	261.953.000	100	363.946.000	100	547.520.000	100	1.415.372.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.01.2. 08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	4	61.953.000	4	113.946.000	4	197.520.000	16	435.372.000	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.03.01.2. 08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	104	200.000.000	104	250.000.000	104	350.000.000	416	980.000.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.01.2. 09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	(Jumlah jenis BMD yang dipelihara dibagi jumlah jenis BMD yang ada) x 100%	%	100	343.796.400	100	450.476.000	100	1.452.513.000	100	2.522.078.400	Dinas PUPR	Kota Blitar
.03.01.2.0 9.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	28	116.881.400	28	223.561.000	28	325.150.000	112	772.473.800	Dinas PUPR	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah / Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.03.01.2. 09.0005	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	jumlah mebel yang dipelihara	jumlah mebel yang dipelihara	unit	39	10.000.000	39	10.000.000	39	75.263.000	156	113.463.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.01.2. 09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	20	12.915.000	20	12.915.000	20	105.000.000	80	174.590.400	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.01.2. 09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitas i	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitas i	unit	3	164.835.000	3	164.835.000	3	752.100.000	12	1.162.741.000	Dinas PUPR	Kota Blitar
1.03.01.2. 09.0011	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi	unit	3	39.165.000	3	39.165.000	3	195.000.000	12	298.810.200	Dinas PUPR	Kota Blitar

LAMPIRAN B

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PERUBAHAN DINAS PU & PENATAAN RUANG
TAHUN 2025**

RENCANA KINERJA (RKT) TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BLITAR

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah
Indikator : Indeks Infrastruktur Daerah

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
1	Meningknya Kualitas Insfrastruktur Bina Marga	Indeks Infrastrukrur Bina Marga	81.00	Program penyelenggaran jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik	99.80							6,771,158,881.06
					Persentase jembatan dalam kondisi baik	99.90							
							Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan yang dipelihara dan direhabilitasi	5.09				0.00
								Persentase jembatan yang dibangun	100				
								Persentase jembatan yang dipelihara	6.12				

[illegible]

[illegible]

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
3	Meningknya Kualitas Insfrastruktur Cipta karya	Presentase Gedung Pemerintah Sesuai Standart	94.90%	Program penataan bangunan gedung	Persentase fasilitas umum skala kota yang dibangun	95.65							16,412,435,000.00
					Persentase gedung pemerintahan yang dibangun	95.83							
							Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase persetujuan bangunan gedung yang diterbitkan	100.00				16,412,435,000.00
										Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	5 Dokumen	16,138,100,000.00

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
										Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	2 Dokumen	274,335,000.00
4	Meningknya kompetensi jasa konstruksi	Presentase Peran Aktif Jasa konstruksi	57.75%	Program pengembangan jasa konstruksi	Persentase pekerjaan konstruksi yang sesuai standar	100.00							635,916,000.00
							Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	94.56				485,916,000.00

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
										Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang difasilitasi sertifikasi	100 Orang	264,676,000.00
										Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah lembaga Jasa Konstruksi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	100 Lembaga	221,240,000.00
							Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jasa konstruksi yang termuat dalam SIPJAKI	80				150,000,000.00
										Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen DATA dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	4 Dokumen	150,000,000.00
5	Meningkatnya Akses Air minum yang layak melalui SPAM	Presentase rumah tangga yang memiliki akses sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	3.19%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase sistem penyediaan air minum (SPAM) dalam kondisi baik	90.10							154,567,600.00

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
							Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SPAM yang terbangun	89.47				154,567,600.00
										Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	1 Dokumen	154,567,600.00
6	Meningkatnya Akses Sanitasi Layak melalui SPALD	Presentase rumah tangga yang memiliki Akses Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	10.19%	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) dalam kondisi baik	85.00							1,295,244,600.00
							Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah	Persentase SPALD yang terbangun	89.47				1,295,244,600.00
										Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah instalisasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	1 Unit	124,272,000.00

[illegible]

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
7	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Presentase penyelenggara an penataan ruang	54,12 %	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketersediaan Dokumen Tata Ruang	94.75							1,287,962,000.00
							Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase persetujuan subtansi, evaluasi dan penetapan RTRW dan RRTR Kota	100.00				474,297,600.00
										Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen kebijakan Perda / Perkada selain RTRW Kabupaten / Kota	1 Dokumen	185,000,000.00
										Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan subtansi RTRW Kabupaten / Kota	1 Dokumen	79,500,000.00
										Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan subtansi RDTR Kabupaten / Kota	1 Dokumen	114,900,000.00
										Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang - undangan bidang penataan ruang	1 Laporan	94,897,600.00

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
							Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan sistem informasi tata ruang	100.00				274,540,000.00
										Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	500 layanan	99,540,000.00
										Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	100,000,000.00
										Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	75,000,000.00
							Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketidaksesuaian tata ruang yang ditindaklanjuti	100.00				539,124,400.00
										Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	3 Dokumen	157,828,400.00
										Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen Tekstual dan spasial hasil penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	1 Dokumen	78,036,000.00

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
										Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Penataan Ruang	12 Laporan	102,400,000.00
										Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil penilaian perwujudan RTR	1 Dokumen	100,000,000.00
										Pemberian Insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	1 Berita acara	100,860,000.00
8	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat daerah	85.95	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.90							7,925,429,801.94
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100.00				18,753,216.00
										Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10,113,216.00

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	8,640,000.00
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100.00				5,532,224,200.00
										Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang /bulan	5,531,483,440.00
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	740,760.00
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100.00				296,922,270.54
										Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	135,507,270.54

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
										Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 orang	161,415,000.00
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100.00				622,307,890.00
										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	8,143,800.00
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 paket	38,057,100.00
										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	17,339,090.00
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	79,796,300.00
										Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	16,537,200.00
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	7,200,000.00

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	255,296,900.00
										Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen	199,937,500.00
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100.00				356,689,040.40
										Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	32 Unit	110,578,550.00
										Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	246,110,490.40
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100.00				505,571,520.00
										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	150,152,620.00
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	104 Laporan	356,418,900.00

[illegible]

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN												
				Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase kasus pertanahan yang ditindaklanjuti	100.00							25,030,500.00
							Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sengketa tanah garapan yang ditindaklanjuti	100.00				25,030,500.00
										Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Berita acara	25,030,500.00
				Program Penatagunaan Tanah	Persentase Tanah Aset Pemerintah Kota Bersertifikat	99.00							260,080,000.00
							Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen pertanahan yang tersusun	99.00				260,080,000.00

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
										Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	50,000,000.00
										Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	210,080,000.00

Blitar, 6 Januari 2025

Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Blitar



Ir. ERNA SANTI, MT

Pembina Utama Muda

NPI 19670516 199803 2 004

LAMPIRAN C

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PU & PENATAAN RUANG
TAHUN 2025**

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. ERNA SANTI, M.T**
Jabatan : **Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I.**
Jabatan : **Walikota Blitar**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blitar, 18 April 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar
Kota Blitar,


Walikota Blitar,
SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I.


Ir. ERNA SANTI, M.T
Pemimpin Utama Muda (IV/c)
NIP. 196705161998032004

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BLITAR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	96.25(%)
2	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	99.00(%)
		Persentase Rumah Tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	99.215(%)
3	Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum	Indeks infrastruktur pekerjaan umum	89.69(Indeks)
4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	54.12(%)
5	Meningkatnya akses sanitasi layak melalui SPALD	Persentase rumah Tangga yang memiliki akses Sistem Pengelolaan Air Limbah domestik (SPALD)	10.19(%)
6	Meningkatnya akses air minum yang layak melalui SPAM	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	3.19(%)
7	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Bina Marga	Indeks infrastruktur Bina Marga	81.00(Indeks)
8	Meningkatnya kompetensi jasa konstruksi	Persentase peran aktif jasa konstruksi	57.75(%)
9	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks infrastruktur Sumber Daya Air	99.25(Indeks)
10	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Persentase gedung Pemerintah sesuai standar	94.90(%)
11	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.95(Nilai)

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1,024,862,000.00	Pendapatan Bagi Hasil
2	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	624,177,100.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	8,575,873,846.08	Dana Bagi Hasil (DBH), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pendapatan Bagi Hasil
4	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	345,080,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	10,351,717,800.00	Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil
6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	3,441,106,100.00	Pendapatan Bagi Hasil
7	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1,048,194,600.00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pajak Air Tanah, Pendapatan Bagi Hasil
8	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	16,400,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
9	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	148,235,000.00	Pendapatan Bagi Hasil
10	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	4,912,859,947.00	Pendapatan Bagi Hasil
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,636,368,938.92	Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil
Total:		38,124,875,332.00	

Blitar, 18 April 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

Walikota Blitar,

SYAGOL MUHIBBIN, S.H.I.


IF ERNA SANTI, M.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196705161998032004

LAMPIRAN D

**PENGUKURAN KINERJA DINAS PU & PENATAAN RUANG
TAHUN 2025**

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025
PEMERINTAH KOTA BLITAR

No	Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024		2025		Presentase	RUMUS PENGHITUNGAN	PERMASALAHAN/ FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDUKUNG	TINDAK LANJUT
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					11	12	13
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IKU KOTA														
		-														
		IKU OPD														
		Indeks infrastruktur Bina Marga	Angka	75,15	NA	77,1	79,05	79,1	82,76	83,26	84,87	101,93	Rata-rata penjumlahan persentase jalan dalam kondisi baik, jalan dengan bahu jalan, jalan dengan trotoar dan jalan dengan pelengkap jalan dalam kondisi baik	Masih terdapat jalan yang rusak berat di Kota Blitar sebesar 244,316 km – 225,869 km = 18,477 km. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kendaraan ODOL (Over Dimension Over Loading) yang melintas diruas jalan yang tidak sesuai kelas dan beban layanan jalannya; Masih banyaknya kendaraan dengan beban overload melintas diruas jalan yang tidak sesuai fungsi dan persyaratan	Koordinasi yang masif dengan instansi terkait dalam upaya mempercepat capaian kinerja, Sinergitas antar stakeholder	Diadakan preservasi jalan berupa rehabilitasi / pemeliharaan jalan serta Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk sosialisasi dan penertiban pengguna jalan
		Indeks infrastruktur Sumber Daya Air	Angka	96,15	NA	97,00	98,42	98,5	98,61	99,25	97,37	98,11	Rata-rata penjumlahan persentase saluran pengairan + persentase drainase dalam kondisi baik	Sebagian konstruksi jaringan irigasi telah melewati umur bangunan sehingga rawan mengalami kerusakan Banyaknya endapan dan sampah di saluran irigasi dan drainase menyebabkan saluran tidk berfungsi secara optimal	Monitoring dan Evaluasi serta updating terhadap kondisi jaringan irigasi yang dilakukan secara berkala	1. Melakukan pemeliharaan rutin terhadap jaringan irigasi yang mengalami kerusakan ringan 2. Peningkatan Kapasitas SDM untuk Tim Pemeliharaan Rutin 3. Menyampaikan kepada pemangku wilayah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah ke saluran dan secara berkala membersihkan saluran
		Persentase gedung pemerintah sesuai standar	Persen	94,41	91,99	94,60	94,80	94,85	96,91	97,41	96,97	99,55	(Jumlah bangunan gedung pemerintah yang sesuai standart dibagi jumlah total bangunan gedung pemerintah) x 100%	1. Masih terdapat bangunan gedung yang sudah tidak memadai atau tidak sesuai dengan standart bangunan gedung antara lain ketentuan	Penanganan pemenuhan standar bangunan yang teralokasikan di beberapa perangkat daerah selaku pengguna/pengelola	Melaksanakan movev sebagai masukan dan laporan serta secara bertahap melaksanakan Pembangunan/ Rehabilitas/ Pemeliharaan Gedung
		Persentase peran aktif jasa konstruksi	Persen	NA	75	71,6	57,7	57,75	80,00	80,50	83,33	103,52	(Jumlah jasa konstruksi yang aktif dibagi jumlah total jasa konstruksi Kota Blitar) x 100%	Masih rendahnya tingkat kompetensi bagi pelaku jasa konstruksi terutama di wilayah Kota Blitar	Tertib perjanjian dan tertib administrasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi serta terlaksanakanya pekerjaan konstruksi yang tepat waktu, tepat mutu dan tepat biaya	Melaksanakan pembinaan yang aktif kepada pelaku jasa konstruksi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar; Pemberian perhatian dalam bentuk reward dan punishment pada penyedia jasa konstruksi
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Persen	NA	NA	6,82	9,36	9,82	10,81	11,31	10,90	96,37	(Jumlah rumah tangga yang memiliki akses SPALD dibagi jumlah rumah tangga) x 100%	- Ketersediaan lahan dan keberlanjutan pengelolaan SPALD terbangun - Belum adanya regulasi terkait pengelolaan air limbah	koordinasi yang masif dengan instansi terkait dalam upaya mempercepat capaian kinerja, Sinergitas antar stake holder	- Perlu penyediaan / pembebasan lahan untuk pembangunan SPALD dan melakukan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengelola guna meningkatkan peran Kelompok Masyarakat Pengelola - Sosialisasi kepada masyarakat
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Persen	NA	NA	1,51	3,13	3,18	3,61	4,11	3,75	91,24	(Jumlah rumah tangga yang memiliki akses SPAM dibagi jumlah rumah tangga) x 100%	- Pembagian kewenangan penanganan antara SPAM masyarakat dan oleh PDAM perlu diperjelas - Keterbatasan pengetahuan atas keberlanjtan SPAM oleh masyarakat - Kurang tersedianya lahan untuk pembangunan SPAM baru	koordinasi yang masif dengan instansi terkait dalam upaya mempercepat capaian kinerja, Sinergitas antar stake holder	- Perlu pembinaan untuk mendorong masyarakat agar lebih memilih untuk menggunakan air perpipaan - Memperkuat koordinasi paguyuban kelompok pengelola SPAM

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025
PEMERINTAH KOTA BLITAR

No	Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024		2025		Presentase	RUMUS PENGHITUNGAN	PERMASALAHAN/ FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDUKUNG	TINDAK LANJUT
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi					
		Persentase penyelenggaraan penataan ruang	Persen	NA	NA	57,33	52,83	52,88	78,75	79,25	78,75	99,37	Rata-rata penjumlahan persentase perencanaan penataan ruang + persentase pengendalian pemanfaatan ruang	Belum optimalnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Peningkatan peran forum penataan ruang Kota Blitar dalam mendukung penyelenggaraan penataan ruang; Penerapan Teknologi Aplikasi pendukung Pencapaian Kinerja, Kerjasama Tim, Koordinasi yang baik	1. Segera melaksanakan proses penetapan revisi RDTR 2. Mengoptimalkan koordinasi antar dinas terkait Untuk pelaksanaan pengendalian tata ruang 3. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi simtaru dalam rangka menghimpun data pelanggaran pemanfaatan ruang
		SASARAN RPJMD														
		Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum														
		- Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	indeks	NA	NA	87,08	88,53	88,42	90,44	90,94	89,94	98,90	50% Indeks Infrastruktur Bina Marga+40% Indeks Infrastruktur SDA+10% Indeks Infrastruktur Cipta Karya	Belum maksimalnya peran stakeholder dalam ikut meningkatkan infrastruktur; peran aktif dalam musrenbang belum	Ketersediaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, Komitmen pimpinan daerah memperkuat koordinasi serta	Meningkatkan peran stakeholder dalam peningkatan infrastruktur; peran masyarakat yang berperan aktif dalam musrenbang ditingkatkan; serta peningkatan
		Meningkatnya kualitas penataan ruang														
		- Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	Persen	NA	NA	90,33	95,73	95,45	98,7	99,20	98,30	99,09	(Luas lahan yang sesuai tata ruang dibagi Total Luas lahan) x 100%	Masih terdapat kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak memperhatikan rencana tata ruang	Penerapan Teknologi Aplikasi pendukung Pencapaian Kinerja, Kerjasama Tim, Koordinasi yang baik	Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran perlunya memperhatikan rencana tata ruang sebelum melaksanakan kegiatan
		Meningkatnya ketersediaan dan kualitas prasarana , sarana dan Utilitas di Kawasan Pemukiman														
		Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan		NA	NA	NA	99,216	99,26	99,616	100,00	100,00	100,00	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	- Ketersediaan lahan dan keberlanjutan pengelolaan SPALD terbangun - Belum adanya regulasi terkait pengelolaan air limbah	koordinasi yang masif dengan instansi terkait dalam upaya mempercepat capaian kinerja, Sinergitas antar stake holder	- Perlu penyediaan / pembebasan lahan untuk pembangunan SPALD dan melakukan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengelola guna meningkatkan peran Kelompok Masyarakat Pengelola - Sosialisasi kepada masyarakat terkait himbauan penyedotan tangki septik secara berkala
		Persentase Rumah Tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan		NA	NA	NA	98,7	98,76	100	100,00	100,00	100,00	Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari	- Pembagian kewenangan penanganan antara SPAM masyarakat dan oleh PDAM perlu diperjelas - Keterbatasan pengetahuan atas keberlanjtan SPAM oleh masyarakat - Kurang tersedianya lahan untuk pembangunan SPAM	koordinasi yang masif dengan instansi terkait dalam upaya mempercepat capaian kinerja, Sinergitas antar stake holder	- Perlunya pembinaan untuk mendorong masyarakat agar lebih memilih untuk menggunakan air perpipaan - Memperkuat koordinasi paguyuban kelompok pengelola SPAM
		TUJUAN RPJMD														
		- Indeks Infrastruktur Daerah	indeks	0	0	61,18	62,05	58,47	63,59	63,7429	63,04	98,90	70 % Indeks Infrastruktur PU + 30% level of service	-	-	-

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025
PEMERINTAH KOTA BLITAR

No	Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024		2025		Presentase	RUMUS PENGHITUNGAN	PERMASALAHAN/ FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDUKUNG	TINDAK LANJUT
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi					
		SAKIP	Nilai					85,5	85,90	85,95	85,95	100,00	Nilai SAKIP	1. Publikasi atas dokumen perencanaan melalui website perangkat daerah yaitu http://dinaspupr.blitarkota.go.id belum tepat waktu, 2. Pengumpulan data kinerja sebagian besar masih menggunakan cara manual	SDM aparatur yang sudah terlatih dalam penyusunan perencanaan, indikator, dan pelaporan, Komitmen pimpinan dalam mendukung akuntabilitas kinerja	1. Melakukan publikasi dokumen perencanaan secara tepat waktu agar agar dapat dimanfaatkan secara lebih optimal 2. Memanfaatkan teknologi informasi secara lebih optimal dalam pengumpulan data kinerja sehingga diperoleh data dukung kinerja yang
		IKK OUTCOME Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Persen	0	0	100	100	NA	NA	100	97,84	97,84	(Luas Kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir Kewenangan Kab / Kota : Luas kawasan rawan banjir Kewenangan Kab / Kota) x 100%	Semua sungai atau anak sungai yang ada di wilayah Kota Blitar merupakan kewenangan WS Brantas, sehingga untuk Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendali Banjir di WS Kewenangan Kota TIDAK ADA	Peraturan Menteri PUPR Nomor : 04/PRT/M/2016 tentang kriteria dan penetapan wilayah	Mengkoordinasikan ke BBWS Brantas apabila ada permukiman yang rawan banjir
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	indeks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	Semua sungai atau anak sungai yang ada di wilayah Kota Blitar merupakan kewenangan WS Brantas, sehingga untuk Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendali Banjir di WS Kewenangan Kota TIDAK ADA	Peraturan Menteri PUPR Nomor : 04/PRT/M/2016 tentang kriteria dan penetapan wilayah	Mengkoordinasikan ke BBWS Brantas apabila ada permukiman yang rawan banjir
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	indeks	94,7	100	100	97,5	98	98	100	100	100	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi dibagi total daerah irigasi di Kota Blitar	Perlunya Peningkatan koordinasi antara seluruh stake holder (Pemerintah, Komisi Irigasi, HIPPA, dan masyarakat petani)	Penerapan Teknologi Aplikasi pendukung Pencapaian Kinerja, Koordinasi yang masif atas upaya mendukung percepatan capaian kinerja	Mengadakan pertemuan dan koordinasi secara berkala
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	89,37	96,56	100	91,73	2,23	98,4	4,11	3,75	91,24	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dibagi Jumlah Rumah Tangga (RT) di Kota Blitar x 100%	- Pembagian kewenangan penanganan antara SPAM masyarakat dan oleh PDAM perlu diperjelas - Keterbatasan pengetahuan atas keberlanjutan SPAM oleh masyarakat - Kurang tersedianya lahan untuk pembangunan SPAM baru	koordinasi yang masif dengan instansi terkait dalam upaya mempercepat capaian kinerja, Sinergitas antar stake holder	- Perlunya pembinaan untuk mendorong masyarakat agar lebih memilih untuk menggunakan air perpipaan - Memperkuat koordinasi paguyuban kelompok pengelola SPAM
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	98,17	98,18	100	92,36	7,46	98,7	11,31	10,9	96,37	Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dibagi Jumlah Rumah Tangga di Kota Blitar x 100%	- Ketersediaan lahan dan keberlanjutan pengelolaan SPALD terbangun - Belum adanya regulasi terkait pengelolaan air limbah	koordinasi yang masif dengan instansi terkait dalam upaya mempercepat capaian kinerja, Sinergitas antar stake holder	- Perlu penyediaan / pembebasan lahan untuk pembangunan SPALD dan melakukan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengelola guna meningkatkan peran Kelompok Masyarakat Pengelola - Sosialisasi kepada masyarakat terkait himbauan penyedotan tangki septik secara berkala
		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	indeks	100	100	100	17,3	35,2	17,44	100	75,56	75,56	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang digunakan sesuai peruntukannya dibagi jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku x 100%	Rendahnya kesadaran warga untuk mengajukan PBG/SLF	(PermenPUPR No. 5/2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan) dan PP 16 Tahun 2021	1. Perlunya peran aktif dari stake holder terkait untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait dengan pemgurusan PBG. 2. Perlunya standarisasi terutama terkait dengan dokumen rencana teknis yang perlu diterbitkan oleh kementerian

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025
PEMERINTAH KOTA BLITAR

No	Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024		2025		Presentase	RUMUS PENGHITUNGAN	PERMASALAHAN/ FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDUKUNG	TINDAK LANJUT
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi					
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	98,7	96,6	97,8	98	99,6	92,47	92,35	92,357	100,01	(Panjang jalan yang mantap : Panjang total jalan) x 100%	Banyaknya kendaraan yang lewat jalan tidak sesuai fungsinya (ODOL),	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13 /PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan	Perlunya sinergitas dengan OPD lain, pemangku wilayah dan instansi vertikal yang menangani tertib lalu lintas
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	indeks	30	82,2	100	100	85,79	100	100	100	100	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis dibagi jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analisis yang terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota x 100%	Terbatasnya jumlah LSP yang mengampu	1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 ttg Jasa Kontruksi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 ttg Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 ttg Jasa Kontruksi; 3. Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 10/2019 ttg Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Kontruksi.	Melaksanakan komunikasi yang aktif dengan kementrian PUPR dan LPJK serta komitmen bersama Badan Usaha Jasa Konstruksi yang ada
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	indeks	0	100	100	100	100	100	100	100	100,00	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi dibagi jumlah total proyek konstruksi	Belum maksimalnya kesadaran pelaku jasa konstruksi terhadap SMKK	Pasal 80 UU 2/2017 tentang Jasa Kontruksi	Pembinaan dan Peningkatan terhadap pelaku jasa konstruksi pentingnya SMKK
		Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	0	0	0	0	100	100	100	100	0	Jumlah pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibagi dengan jumlah izin lokasi yang diterbitkan) x 100%	tidak ada masalah	-	-
		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	0	0	0	0	100	100	100	100	0	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum dibagi jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum x 100%	tidak ada masalah	-	-
		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	tidak ada masalah	-	-
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	tidak ada masalah	-	-
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	tidak ada masalah	-	-
		Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	0	0	0	0	0	0	2	2	100,00	(Jumlah kasus tanah garapan belum bersertifikat yang ditindaklanjuti yang dilakukan melalui mediasi dibagi jumlah kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui medias) x 100%	tidak ada masalah	-	-